



# BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kementerian Sekretariat Negara tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan rencana tingkat capaian (*target*) masing-masing indikator kinerja utama dengan capaian kinerja nyata (*realisasi*), melalui penilaian sendiri (*self assessment*). Capaian Kinerja meliputi capaian kinerja tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja organisasi.

Capaian indikator kinerja tujuan menginformasikan capaian kinerja sampai dengan tahun kelima sesuai periode Renstra Kementerian Sekretariat Negara tahun 2010-2014. Capaian kinerja sasaran menginformasikan kinerja, baik berupa *output* maupun *outcome* pada tahun 2014.

### 1. Capaian Kinerja Tujuan

Capaian kinerja tujuan diukur dengan tiga indikator kinerja tujuan yang menginformasikan capaian kinerja tujuan selama tahun 2014, seperti pada tabel di bawah ini.



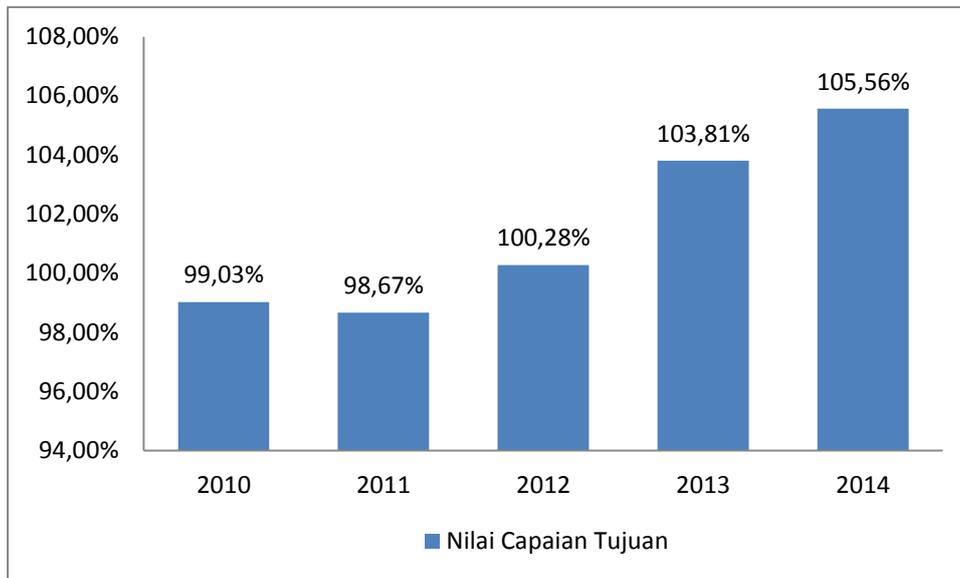
**Tabel 9**  
**Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2014**  
**Kementerian Sekretariat Negara**

Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara	1. Persentase hasil analisis dan rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang diselesaikan sesuai standar	100%	105,72%	105,72%
	2. Persentase dukungan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan sesuai standar	100%	107,39%	107,39%
	3. Persentase pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden sesuai standar	100%	103,58%	103,58%
<b>Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2014</b>		<b>105,56%</b>		

Capaian kinerja tujuan selama lima tahun sesuai periode Renstra Kementerian Sekretariat Negara tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut.



**Gambar 2**  
**Capaian Kinerja Tujuan 2010 – 2014**



Capaian kinerja tujuan dari tahun 2010 sampai 2014 secara umum mengalami peningkatan. Capaian kinerja tujuan tahun 2012 diukur melalui indikator kinerja tujuan berdasarkan pada Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Tahun 2010-2014, capaian lebih dari 100% disebabkan oleh realisasi yang melebihi target.

Capaian kinerja tujuan tahun 2013 dan 2014 mencapai lebih dari 100%. Hal tersebut disebabkan adanya penghitungan aspek ketepatan waktu, yang memungkinkan pencapaian kinerja dilakukan lebih cepat dari waktu standar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Dan Sekretariat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan.



## 2. Capaian Kinerja Sasaran

### a. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2014

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2014 memperoleh nilai rata-rata 105,56%.

Capaian masing-masing sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara tahun 2014 terdapat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 10**  
**Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2014**

No.	Sasaran	Kinerja Tahun 2014			Anggaran Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
1.	Terselenggaranya dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan dengan baik dan lancar	100%	105,72%	105,72%	Rp10.425.086.000	Rp8.654.750.905	83,02
2.	Terjaminnya kelancaran dukungan administrasi Presiden dan Wakil Presiden	100%	107,39%	107,39%	Rp22.282.349.000	Rp20.305.007.106	91,13
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan bagi Presiden dan Wakil Presiden	100%	103,58%	103,58%	Rp235.404.672.340	Rp193.676.568.921	82,27
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis				105,56%	Rata-rata penyerapan Anggaran		83



Anggaran untuk mendukung capaian kinerja tiga sasaran tersebut adalah **sebesar Rp268.112.107.340,-** dengan realisasi sebesar **Rp222.636.326.932,- (83%)**.

Capaian kinerja Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2014 **sebesar 105,56%**, **sedangkan realisasi sebesar 83%**, **hal ini menunjukkan adanya efisiensi penyerapan anggaran.**

## **b. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Selama Periode Renstra Tahun 2010-2014**

### 1) Tahun 2010

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2010, Kementerian Sekretariat Negara memiliki delapan sasaran, dimana hasil rata-rata pengukuran capaian kinerja delapan sasaran tersebut adalah 99,02%.

Capaian masing-masing sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara tahun 2010 terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 11**  
**Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2010**

No.	Sasaran	Tahun 2010		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Terselenggaranya dukungan administrasi pengangkatan dan pemberhentian Perwira TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, Perwira Kepolisian Negara RI dan Pejabat Negara secara cepat, tepat, dan aman	100%	100%	100%



No.	Sasaran	Tahun 2010		
		Target	Realisasi	Capaian
2.	Tersedianya telaahan staf mengenai masalah penyelenggaraan kekuasaan negara, yang dapat memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan aman	91%	85,25%	93,68%
3.	Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden serta Istri/Suami Presiden dan Wakil Presiden, Tamu Negara dan kegiatan penting lainnya yang memenuhi standar	95%	93,61%	98,54%
4.	Terlaksananya penyelesaian administrasi penganugerahan gelar pahlawan dan tanda-tanda jasa/kehormatan RI secara cepat, tepat, dan aman	100%	100%	100%
5.	Terselenggaranya hubungan kelembagaan yang lebih harmonis dan sinergis	100%	100%	100%
6.	Terselenggaranya perencanaan, administrasi keuangan yang transparan, dan tata usaha perkantoran, serta kerjasama teknik luar negeri	100%	100%	100%



No.	Sasaran	Tahun 2010		
		Target	Realisasi	Capaian
7.	Tersedianya naskah-naskah Presiden dan Wakil Presiden	100%	100%	100%
8.	Terselenggaranya pengawasan dan pengembangan akuntabilitas kinerja serta penanganan pengaduan masyarakat yang efektif	100%	100%	100%

Keberhasilan kinerja pencapaian delapan sasaran strategis tersebut antara lain didukung oleh peningkatan komitmen pimpinan dan staf di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara terhadap kinerja, dan peningkatan kualitas koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengumpulan dan pengolahan data kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

## 2) Tahun 2011 sampai dengan 2014

Berdasarkan hasil Pemutakhiran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2011 yang dilakukan bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta adanya usulan dari satuan organisasi, maka dilakukan penyempurnaan terhadap sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2010-2014.



Capaian kinerja tiga sasaran strategis pada tahun 2011 memperoleh nilai rata-rata 98,86%, dan menghasilkan 1654 rekomendasi, 24 Undang-undang, 79 Rancangan Peraturan Pemerintah, 77 Pertimbangan Rancangan Perpres, 151 laporan terkait hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan, 162 Keppres, 237.006 orang penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui Presiden, 4.341 berkas pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, 24.859 dokumen kerjasama teknik luarnegeri, 814 kegiatan layanan kerumahtanggaan kepada Presiden, 673 kegiatan layanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden, 814 layanan keprotokolan kepada Presiden, 732 kegiatan layanan keprotokolan kepada Wakil Presiden, dan 711 kegiatan pengamanan VVIP.

Capaian kinerja tiga sasaran strategis pada tahun 2012 memperoleh nilai rata-rata 100%, dan menghasilkan 1211 rekomendasi, 119 analisis atas 46 rancangan Undang-undang, 195 hasil analisis atas 135 Rancangan Peraturan Pemerintah, 64 hasil analisis atas 60 pertimbangan rancangan Perpres, 24 Undang-undang, 116 PP, 107 laporan terkait hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan, 836 rancangan Keppres, 251.187 orang penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui Presiden, 6.054 berkas pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, terselesaikannya dokumen kerjasama teknik luar negeri, layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden, serta pengamanan VVIP.

Capaian kinerja tiga sasaran strategis pada tahun 2013 memperoleh nilai rata-rata 103,81%, dan menghasilkan 1.926 dokumen rekomendasi, 206 hasil analisis atas 66 RUU, 224 hasil analisis atas 146 RPP, 59 hasil analisis atas 59 pertimbangan rancangan Perpres, penyelesaian 24 RUU, 1 Rancangan Perpu. dan 100 Rancangan PP, 97 laporan terkait hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan, 769 rancangan Keppres



terkait administrasi pejabat negara, 90 rancangan Keppres terkait administrasi TNI dan Polri, 228.541 orang penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui Presiden, 8.362 surat pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, terselesaikannya dokumen kerjasama teknik luar negeri, layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden, serta pengamanan VVIP.

Capaian masing-masing sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara tahun 2011 sampai dengan 2014 terdapat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 12**  
**Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2011 - 2014**

No.	Sasaran	2011			2012			2013			2014		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terselenggaranya dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan dengan baik dan lancar	98%	94%	96%	100%	99,66%	99,66%	100%	106,04%	106,04%	100%	105,72%	105,72%
2.	Terjaminnya kelancaran dukungan administrasi Presiden dan Wakil Presiden	98,75 %	98,83%	100%	100%	101,79%	101,79%	100%	105,38%	105,38%	100%	107,39%	107,39%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan bagi Presiden dan Wakil Presiden	94%	94%	100%	100%	99,38%	99,38%	100%	100%	100%	100%	103,58%	103,58%



## B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2014

### 1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2014

“Terselenggaranya dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan dengan baik dan lancar”

Capaian kinerja sasaran strategis 1 ini diukur oleh IKU sebagai berikut:

- IKU 1 : Persentase rekomendasi hasil analisis di bidang kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang dirumuskan sesuai standar;
- IKU 2 : Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai standar; dan
- IKU 3 : Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden yang dilaksanakan sesuai standar.

Pada tahun 2014 capaian kinerja sasaran strategis 1 sebesar 105,72%. Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran strategis 1 sebesar Rp10.425.086.000,- dan realisasi sebesar Rp8.654.750.905,- (82,06%). **Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 sebesar 105,72%., sedangkan realisasi sebesar 83,02%, hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran.**

Rincian capaian kinerja dan realisasi anggaran sasaran strategis 1 pada tabel berikut.



Tabel 13

## Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan IKU Tahun 2014

No	Sasaran/IKU		Kinerja Tahun 2014			Anggaran Tahun 2014		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
1.	Terselenggaranya dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan dengan baik dan lancar		100%	105,72%	105,72%	Rp10.425.086.000	Rp8.654.750.905	83
	IKU 1	Persentase rekomendasi hasil analisis di bidang kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang dirumuskan sesuai standar	100%	100%	100%	Rp8.492.471.000	Rp7.154.796.581	84,25
	IKU 2	Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	100%	Rp577.919.000	Rp395.780.925	68,48



No	Sasaran/IKU		Kinerja Tahun 2014			Anggaran Tahun 2014		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
	IKU 3	Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden yang dilaksanakan sesuai standar	100%	117,16%	117,16%	Rp1.354.696.000	1.104.173.399	81,51

*Outcomes* dari sasaran strategis 1 adalah sebagai berikut:

- meningkatnya kualitas dukungan kebijakan serta mendorong percepatan penyelesaian permasalahan dan pelaksanaan kebijakan dalam negeri dan hubungan internasional kepada Presiden dan Wakil Presiden;
- meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur dalam memberikan dukungan pengambilan kebijakan;
- meningkatnya efektivitas pengelolaan Peraturan Menteri dan peraturan perundang-undangan; dan
- terselenggaranya hubungan yang baik dan harmonis antara Presiden dengan Lembaga Negara, Lembaga Nonstruktural, Pemerintah Daerah dan Organisasi Politik serta Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

### Analisis Capaian IKU1

#### IKU 1

**Persentase rekomendasi hasil analisis di bidang kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang dirumuskan sesuai standar**

Dalam rangka mengukur capaian IKU “Persentase rekomendasi hasil analisis di bidang kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang



dirumuskan sesuai standar” menggunakan formulasi penghitungan sebagai berikut :

**• Formulasi Penghitungan:**

$$\left\{ \left[ \frac{\sum \text{nilai variabel semua kegiatan perumusan rekomendasi hasil analisis di bidang kebijakan kepada Presiden yang sesuai dengan standar}}{\sum \text{variabel} \times \sum \text{kegiatan}} \right] \times 100 \% \right] + \left[ \frac{\sum \text{nilai variabel semua kegiatan perumusan rekomendasi hasil kajian di bidang kebijakan kepada Wakil Presiden yang sesuai dengan standar}}{\sum \text{variabel} \times \sum \text{kegiatan}} \right] \times 100 \% \right\} / 2$$

**• Tipe Penghitungan:** Kumulatif

**• Sumber Data:** Standar Pelayanan / *Standard Operating Procedure*, memorandum laporan hasil analisis / kunjungan kerja / perkembangan kegiatan, lembar kerja pelaksanaan kegiatan

**a. Pencapaian IKU**

**Tabel 14**  
**Capaian IKU 1 tahun 2014**

IKU	Kinerja Tahun 2014			Anggaran Tahun 2014		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
Persentase rekomendasi hasil analisis di bidang kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang dirumuskan sesuai standar	100%	100%	100%	Rp8.492.471.000	Rp7.154.796.581	84,25

Pada tabel diatas terlihat, bahwa capaian kinerja IKU ini pada tahun 2014 memperoleh nilai 100%. Dalam mendukung pencapaian IKU, Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan penyusunan rekomendasi hasil analisis di bidang kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang menghasilkan 2.439 dokumen (2.047 dokumen bidang kebijakan dan 392 dokumen rekomendasi kebijakan kepada



Wakil Presiden) rekomendasi yang diselesaikan sesuai standar, dengan rincian sebagai berikut.

- 1) terselesaikannya 2.047 dokumen rekomendasi kepada Presiden RI, yang terdiri dari:
  - a) 1.448 dokumen rekomendasi kebijakan dengan kategori permasalahan substansi, antara lain:
    - (1) Rekomendasi Kebijakan Presiden RI Sehubungan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada upaya perbaikan kebijakan bantuan sosial pada Kementerian dan Lembaga;
    - (2) Rekomendasi Kebijakan Laporan Buku Ikhtisar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Semester II Tahun 2014;
    - (3) Rekomendasi Kebijakan Terhadap surat Drs. Rasing TH. Yoafifi, MM., MPD (Ketua Lembaga Amanah Nusantara Indonesia Wilayah Papua);
    - (4) Rekomendasi Kebijakan Presiden RI Sehubungan permintaan Palau untuk dukungan penyelenggaraan 45<sup>th</sup> *Pacific Islands Forum and Other Forum Related Meetings* (45<sup>th</sup> PIF) di Palau, tanggal 28 Juli-1 Agustus 2014;

**Gambar 3**  
**Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri 45th Pacific Islands Forum di Fiji, (tanggal 28 Juli 2014)**





- (5) Rekomendasi Kebijakan terkait Permohonan Ijin Pencalonan pada Posisi Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB periode 2014-2018;
- (6) Rekomendasi Kebijakan terkait Permohonan Pembebasan Penahanan Dua Orang Jurnalis WN Perancis di Wamena, Papua Barat;
- (7) Rekomendasi Kebijakan dari Kajian WANTANNAS tentang Peningkatan Partisipasi Rakyat Dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014;
- (8) Rekomendasi Kebijakan dari Laporan Harian BIN tentang Situasi Nasional;
- (9) Rekomendasi Kebijakan dari Laporan Triwulan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia;
- (10) Rekomendasi Kebijakan Terkait Perkiraan cepat peningkatan daya saing nelayan melalui revitalisasi klaster industri pengolahan ikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- (11) Rekomendasi kebijakan atas permohonan Direktur Jenderal *Global Green Growth Institute* (GGGI) kepada Presiden RI untuk berkenan menjadi Chair and President GGGI pada periode selanjutnya (referensi surat GGGI no. ODG-1-270814-1 tanggal 27 Agustus 2014);
- (12) Rekomendasi kebijakan atas tindak lanjut dari kesepakatan mengenai Penempatan dan Perlindungan TKI Sektor Domestik antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (KAS) (referensi surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no. B.134/MEN/PPTK-PTKLN/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014);
- (13) Rekomendasi kebijakan atas pembahasan *draft Code of Conduct* (CoC) mengenai *Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation* (Lombok Treaty/Traktat Lombok) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 November 2006, (referensi



surat Menteri Luar Negeri Nomor: 451/LM/08/2014/16/01 tanggal 11 Agustus 2014);

(14) Rekomendasi kebijakan atas permintaan Palau terkait dukungan penyelenggaraan 45<sup>th</sup> *Pacific Islands Forum and Other Forum Related Meetings* (45<sup>th</sup> PIF) di Palau, tanggal 28 Juli-1 Agustus 2014 (referensi surat Menteri Luar Negeri Nomor: 314/BK/06/2014/30/01 tanggal 1 Juni 2014);

(15) Rekomendasi kebijakan atas Usulan Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Presiden Republik Filipina Y.M. Benigno S. Aquino (referensi surat Menteri Luar Negeri No. 381/PK/06/2014/62/01 tanggal 25 Juni 2014);

b) 599 dokumen rekomendasi kebijakan di bidang dalam negeri dan hubungan internasional kategori audiensi, antara lain:

(1) Rekomendasi Kelayakan Permohonan Kepada Presiden Dari Panglima TNI Untuk Memberikan Taklimat serta Menerima Paparan dan Meninjau Latihan Gabungan TNI TA 2014;

(2) Rekomendasi Kelayakan Permohonan Kepada Presiden dari Menteri Hukum dan HAM Untuk Menghadiri dan Menyaksikan Acara Puncak Peringatan Hari AIDS Sedunia (HAS) Tahun 2014 pada tanggal 1 Desember 2014; dan

(3) Rekomendasi Kelayakan Permohonan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia kepada Bapak Presiden untuk Membuka Munas XV HIPMI;



**Gambar 4**  
**Presiden Joko Widodo membuka dan memberikan sambutan pada pembukaan MUNAS XV HIPMI Tahun 2015 di Bandung, Jawa Barat, tanggal 11 Januari 2015**



- (4) Rekomendasi Kelayakan Permohonan Mendagri kepada Presiden RI untuk Memberikan Arahan sekaligus Membuka Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
- (5) Rekomendasi Kelayakan Permohonan audiensi Rektor dan Ketua Pengurus YPP Universitas Pancasila guna melaporkan perkembangan dan persiapan Universitas Pancasila menjadi Perguruan Tinggi Negeri;
- (6) Rekomendasi Kelayakan Permohonan kepada Presiden RI berkenan menyaksikan penyerahan Pesawat Tempur Ringan T50 sebanyak 1 skuadron (16 unit) pada 13 Februari 2014;



**Gambar 5**  
**Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hadir dan menyaksikan serah terima secara langsung pesawat tempur T50i Golden Eagle buatan Korea Selatan di Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma**



- (7) Rekomendasi Kelayakan Permohonan Ketua DEKIN Kepada Presiden RI untuk berkenan Audiensi Bagi Peserta Rakornas KKP Tahun 2014 dan Sidang Anggota DEKIN;
- (8) Rekomendasi Kelayakan Permohonan Wawancara *British Broadcasting Corporation* (BBC) Biro Jakarta kepada Presiden RI;
- (9) Rekomendasi Kelayakan terkait Permohonan Kunjungan Kehormatan Presiden *Boeing Southeast Asia* kepada Presiden RI;
- (10) Rekomendasi Kelayakan terkait Permohonan kepada Presiden RI membuka dan menyampaikan sambutan pada *Jakarta International Defense Dialogue* (JIDD);
- (11) Rekomendasi atas kelayakan permohonan audiensi Ketua *APEC Business Advisory Council* (ABAC) Indonesia kepada Presiden RI untuk membahas persiapan *ABAC Dialogue with Leaders* pada sela-sela penyelenggaraan *APEC Economic Leaders' Week* di Beijing, tanggal 5-11 November 2014 (referensi surat Menteri Luar Negeri Nomor: 582/BK/10/2014/30/01 tanggal 29 Oktober 2014);



- (12) Rekomendasi atas kelayakan Permohonan *The Economist* kepada Presiden RI untuk menjadi *keynote speaker* pada *The World in 2015 Gala Dinner* di Singapura, tanggal 18 November 2014, dan Hong Kong, tanggal 20 November 2014 (berdasarkan referensi surat Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional melalui surat Nomor: 145/SKP-HI/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014);
  - (13) Rekomendasi atas kelayakan permohonan *Chairman World Chinese Economic Forum* kepada Presiden RI untuk memberikan *keynote address* pada pertemuan *6<sup>th</sup> World Chinese Economic Forum (WCEF)* pada tanggal 4-5 Desember 2014 di Chongqing, RRT (referensi surat WCEF no. : CEO/WCEF/2014/5/1688 tanggal 28 Mei 2014);
  - (14) Rekomendasi atas kelayakan permohonan *courtesy call Executive Director UN Habitat*, Dr. Joan Clos, kepada Presiden RI pada tanggal 20 Juni 2014 di Jakarta dalam rangka persiapan penyelenggaraan Konferensi Habitat PBB III tahun 2016 (referensi surat Menteri Pekerjaan Umum melalui surat UM.02.01-Mn/251 tanggal 12 Mei 2014);
  - (15) Rekomendasi atas kelayakan permohonan Presiden *World Peace Committee (WPC)* kepada Presiden RI untuk membuka KTT Perdamaian Dunia *World Peace Committee (KTT-WPC)*, tanggal 5-7 Juli 2014 di Bali (referensi surat WPC no. 018/WPC-P/IV-2014 tanggal 25 April 2014).
- 2) Melakukan penyusunan rekomendasi hasil analisis di bidang kebijakan kepada Wakil Presiden yang dirumuskan sesuai standar.

Rekomendasi hasil kajian di bidang kebijakan kepada Wakil Presiden pada tahun 2014 menghasilkan 392 laporan yang didukung oleh laporan kajian ilmiah bekerja sama dengan instansi terkait dan lingkungan akademisi, diskusi terbatas, semiloka, *Focus Group Discussion (FGD)*, dan kegiatan pemantauan dan evaluasi di lapangan terkait bidang politik, ekonomi, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan, dan tata kelola pemerintahan.



Kegiatan untuk mendukung pencapaian penyusunan rekomendasi hasil analisis di bidang kebijakan kepada Wakil Presiden yang dirumuskan sesuai standar tersebut dapat dilihat dalam kategori bidang:

a) Politik, yang terdiri dari 134 laporan terkait, antara lain:

- (1) *Road Map* Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2015-2025;
- (2) Program Nasional Pencegahan Terorisme (PNPT) Tahun 2014;
- (3) Rancangan Undang-undang Pertanahan;
- (4) Komunikasi Politik yang Ideal dan Efektif; dan
- (5) Skema Koordinasi Kebijakan Perekonomian Pemerintah Pusat dan Daerah.

b) Ekonomi, yang terdiri dari 148 laporan terkait, antara lain:

- (1) Sistem Logistik untuk daya saing dan kedaulatan pangan;
- (2) Persiapan menuju masyarakat ekonomi ASEAN 2015;
- (3) Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2014; dan
- (4) Pemanfaatan Gas Alam menuju Kedaulatan Energi Indonesia.

c) Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, yang terdiri dari 55 laporan terkait, antara lain:

- (1) Peningkatan kesejahteraan rakyat keluarga di bidang kesehatan;
- (2) Manajemen Pemulihan Pasca Bencana di Kabupaten Bantul; dan
- (3) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN) Jangka Menengah Tahun 2015-2019.

d) Tata Kelola Pemerintahan, yang terdiri dari 55 laporan terkait, antara lain:

- (1) Penyusunan Instrumen Pemantauan Reformasi Birokrasi;
- (2) Monitoring dan evaluasi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang pertanahan.



## b. Realisasi Anggaran

Anggaran yang disediakan untuk mencapai IKU tersebut di atas adalah sebesar Rp8.492.471.000,- dengan realisasi sebesar Rp7.154.796.581,-(84,25%). Secara umum rendahnya serapan anggaran disebabkan karena adanya kebijakan penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, dan efisiensi penyerapan anggaran.

## Analisis Capaian IKU 2

### IKU 2

**Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai standar**

Dalam rangka mengukur capaian IKU “Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai standar” menggunakan formulasi sebagai berikut :

- **Formulasi Penghitungan:**

$$\{[(\sum \text{nilai variabel semua analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan standar} / (\sum \text{variabel} \times \sum \text{kegiatan})) \times 100\%] + [(\sum \text{nilai variabel semua penyelesaian peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan standar} / (\sum \text{variabel} \times \sum \text{kegiatan})) \times 100\%]\} / 2$$

- **Tipe Penghitungan:** Kumulatif

- **Sumber Data:** Standar Pelayanan / *Standard Operating Procedure*, agenda dan rekap data, lembar kerja pelaksanaan kegiatan

**a. Pencapaian IKU****Tabel15**  
**Capaian IKU 2 Tahun 2014**

IKU	Kinerja Tahun 2014			Anggaran Tahun 2014		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	100%	Rp577.919.000	Rp395.780.925	68,48

Dalam tahun 2014, capaian kinerja Kementerian Sekretariat Negara untuk hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai standar adalah sebesar 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Dalam mendukung pencapaian IKU, Kementerian Sekretariat Negara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) analisis Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Perpu (RPerpu), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), dan pertimbangan RPerpres sesuai dengan standar, dengan rincian sebagai berikut:

Analisis atas 282 rancangan peraturan perundang-undangan yang hasilnya dilaporkan dalam 662 laporan hasil analisis, dengan rincian:

- a) Analisis atas 75 RUU yang hasilnya dilaporkan dalam 265 laporan hasil analisis, antara lain:

- RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan 3 hasil analisis.



- RUU tentang Pemerintahan Daerah, dengan 12 hasil analisis.
  - RUU tentang Ekstradisi, dengan 12 hasil analisis.
  - RUU tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir), dengan 2 hasil analisis.
  - RUU tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006), dengan 10 hasil analisis.
- b) Analisis atas 149 RPP yang hasilnya dilaporkan dalam 336 laporan hasil analisis, antara lain:
- RPP tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dengan 3 hasil analisis.
  - RPP tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan 1 hasil analisis.
  - RPP tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan 17 hasil analisis.
  - RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan 13 hasil analisis.
- c) Analisis atas 58 RPerpres yang hasilnya dilaporkan dalam 61 laporan hasil analisis, antara lain:
- RPerpres tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan 5 hasil analisis.
  - RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya, dengan 1 hasil analisis.
  - RPerpres tentang Rencana Aksi Pembangunan Karakter Bangsa, dengan 1 hasil analisis.
  - RPerpres tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Eighth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket



Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa), dengan 1 hasil analisis.

- RPerpres tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa (*Voluntary Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the European Union on Forest Law Enforcement, Governance and Trade in Timber Products into the European Union*), dengan 1 hasil analisis.

2) penyelesaian administratif atas 129 peraturan perundang-undangan, dengan rincian:

a) Penyelesaian administratif atas 24 RUU yang disahkan menjadi UU, antara lain:

- UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang;
- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

b) Penyelesaian administratif atas 2 RPerpu yang ditetapkan menjadi Perpu, yaitu:

- Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- Perpu No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

c) Penyelesaian administratif atas 103 RPP yang ditetapkan menjadi PP.



- PP No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- PP No. 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir
- PP No. 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
- PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- PP No. 5 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi

#### **b. Realisasi Anggaran**

Anggaran yang disediakan untuk mencapai IKU tersebut di atas adalah sebesar Rp577.919.000,- dengan realisasi sebesar Rp395.780.925,- (68,48%). Secara umum rendahnya serapan anggaran disebabkan karena adanya kebijakan penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, dan efisiensi penyerapan anggaran.



### Analisis Capaian IKU 3

**IKU 3**  
**Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden yang dilaksanakan sesuai standar**

Dalam rangka mengukur capaian IKU “Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden yang dilaksanakan sesuai standar” menggunakan formulasi sebagai berikut.

- **Formulasi Penghitungan:**  
 $(\sum \text{nilai variabel semua penyusunan memorandum dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden yang sesuai dengan standar} / (\sum \text{variabel} \times \sum \text{kegiatan})) \times 100\%$
- **Tipe Penghitungan:** Kumulatif
- **Sumber Data:** Standar Pelayanan / *Standard Operating Procedure*, memorandum, lembar kerja pelaksanaan kegiatan

#### a. Pencapaian IKU

**Tabel 16**  
**Capaian IKU 3 Tahun 2014**

IKU	Kinerja Tahun 2014			Anggaran Tahun 2014		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden yang dilaksanakan sesuai standar	100%	117,16%	117,16%	Rp1.354.696.000	Rp1.104.173.399	81,51



Pada tabel diatas terlihat, bahwa capaian kinerja IKU ini pada tahun 2014 memperoleh nilai 117,16%. Capaian ini mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya sebesar 2,6%, hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah memorandum yang harus dibuat yaitu bertambah sebanyak 28 memorandum dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penyampaian 125 memorandum dari Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden tersebut merupakan hasil analisis atau telaahan terhadap semua penyampaian permohonan dan/atau aspirasi yang disampaikan oleh lembaga negara, lembaga daerah, lembaga non struktural, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Memorandum tersebut antara lain:

1. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Permohonan audiensi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Apresiasi dari Rektor Universitas Negeri Semarang atas kesuksesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memimpin bangsa selama 10 tahun;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014;
5. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2014 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Putusan Uji Materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang;
7. Hasil Pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Deputi Kementerian BUMN dan Dirut PT. Telkom (Persero) Tbk;
8. Permohonan audiensi dari Ketua Kelompok DPD di MPR selaku Panitia Penyelenggara Sarasehan Nasional;



9. Pertemuan Konsultasi Presiden dengan Pimpinan DPR RI dan DPD RI;
10. Undangan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 Mei 2014 dengan Agenda Penyampaian Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok RAPBN T.A. 2015;
11. Usulan dari Ketua DPR RI mengenai penerbitan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
12. Penyampaian masukan/tanggapan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Presiden atas permohonan audiensi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
13. Penyampaian Laporan Komisi Pengawas Haji Indonesia kepada Presiden;
14. Permohonan perpanjangan masa kerja Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat kepada Presiden;
15. Permohonan membuka rapat pimpinan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014;
16. Permohonan kesediaan Presiden untuk membuka Perdagangan Hari Pertama Tahun 2015 dari Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
17. Permohonan audiensi Ombudsman Republik Indonesia kepada Presiden.
18. Permohonan pertemuan Pembahasan Situasi Hak Asasi Manusia dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
19. Permohonan Pertemuan Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa lalu kepada Presiden;
20. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta Penetapan Pasangan Calon Presiden RI dan Wakil Presiden RI Terpilih Tahun 2014;
21. Undangan pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2014-2019;



22. Permohonan untuk membuka acara Gelar Pemberdayaan Adat dan Budaya Nusantara serta HUT Provinsi Sulawesi Tenggara;
23. Permohonan Peresmian Situs Pekabaran Injil Pulau Mansinam dan proyek infrastruktur wilayah di Provinsi Papua berdasarkan pertimbangan dari Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B);
24. Permohonan Peresmian Situs Pekabaran Injil Pulau Mansinam dan proyek infrastruktur wilayah di Provinsi Papua berdasarkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri;
25. Permohonan audiensi dari Gubernur Aceh;
26. Permohonan untuk membuka Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Nasional XXV tahun 2014 di Batam, Kepulauan Riau;
27. Permohonan dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) untuk membuka Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa;
28. Rekomendasi hasil Rapat Koordinasi Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2014;
29. Undangan sarasehan dari Ketua Dewan Pengurus Daerah Sekretariat Bersama Papua Barat Jokowi-JK;
30. Permohonan dari Gubernur Bali untuk membuka kegiatan Pesta Kesenian Bali ke 37 Tahun 2015;
31. Penjelasan Menteri Hukum dan HAM mengenai perkembangan Partai Golongan Karya;
32. Dukungan dari Menteri Dalam Negeri atas permohonan Ketua APKASI dan APEKSI untuk tatap muka dan silaturahmi dengan Presiden;
33. Permohonan audiensi dari Gubernur Gorontalo guna menyampaikan Program Prioritas Pemerintah Provinsi Gorontalo;
34. Permohonan kehadiran pada acara panen raya bersama antara pemerintah dan masyarakat petani di Kabupaten Simalungun;
35. Permohonan dari Gubernur Sulawesi Tenggara untuk membuka acara *United and Local Government of Asia Pacific Council and Exbu Meeting* 2015;



36. Permohonan Audiensi dari Ketua Umum Pengurus Besar Al Khairaat, Palu, Sulawesi Tengah;
37. Permohonan kehadiran Presiden pada Acara Perayaan Cap Go Meh Bersama dari Panitia Forum Bersama Indonesia Tionghoa;
38. Permohonan kehadiran Presiden dalam rangka Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dari Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Kota Pekalongan Jawa Tengah;
39. Rekomendasi kehadiran Presiden dalam acara Kongres Muslimah Indonesia dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
40. Permohonan membuka Kongres Muslimah Indonesia sesuai pertimbangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
41. Permohonan Audiensi dari Ketua Umum Panitia Nasional Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1936;
42. Permohonan silaturahmi Penyampaian Hasil Silatnas ICMI Tahun 2013 dari Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia;
43. Permohonan audiensi dari Panitia Waisak 2558 BE berdasarkan pertimbangan Menteri Agama;
44. Permohonan Silaturahmi dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia;
45. Permohonan kehadiran Presiden dari Ketua Umum PBNU untuk membuka acara musyawarah dan konferensi besar ke-2 Nahdlatul Ulama;
46. Permohonan membuka acara Munas dan Konbes NU 2014 dari Ketua Umum PBNU;
47. Permohonan kehadiran Presiden RI dari Ketua Umum Pawitandirogo pada acara Silaturahmi/Halal Bi Halal Pawitandirogo;
48. Permohonan Silaturahmi dan Audiensi dari Ketua Badan Wakaf Indonesia;
49. Permohonan audiensi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;



50. Penyampaian Ucapan selamat atas dilantikannya Bapak Ir. Joko Widodo dan DR.(HC) H.M. Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2014-2019 serta permohonan membuka *World Peace Forum* dan Milad Mukammadiyah ke-102 dari Ketua Umum PP Muhammadiyah;
51. Telaah tentang Akses FCTC dari Menteri Kesehatan;
52. Permohonan dari Wakil Menteri Perdagangan untuk membuka pelaksanaan Pameran The 16<sup>th</sup> *Jakarta International Handicraft Trade Fair International* (INACRAFT 2014);
53. Permohonan audiensi dan membuka acara *Indonesian Green Infrastructure Summit* (IGIS) Tahun 2014 dari Ketua Umum KADIN.
54. Permohonan menjadi pembicara pada *Junior Chamber International World Congress* dari Menteri Luar Negeri;
55. Permohonan pengambilan gambar *video* dalam rangka Indonesia tuan rumah penyelenggaraan Asian Games ke-18 Tahun 2018 dari Komite Olimpiade Indonesia;
56. Permohonan peresmian Pekan Raya Jakarta Fair 2014 dari Plt. Gubernur DKI Jakarta;
57. Verifikasi Proyek MP3EI di Provinsi Banten yang akan di Groundbreaking dan diresmikan oleh Presiden dari Kemenko Bidang Perekonomian;
58. Permohonan kesediaan untuk melakukan kunjungan "blusukan" ke lokasi kebakaran hutan gambut di Provinsi Riau dari Direktur Eksekutif WALHI;
59. Permohonan untuk membuka Acara *Sulawesi Night* "Malam Pagelaran Seni Budaya Sulawesi 2014" dari Ketua Dewan Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi;
60. Ucapan selamat atas dilantikannya Bapak Ir Joko Widodo sebagai Presiden RI periode 2014-2019 dan permohonan audiensi untuk membuka pameran IFFINA 2015 dari Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia;
61. Permohonan audiensi dari Ketua Umum Forum Yayasan Relawan Indonesia;



62. Permohonan menerima penghargaan Konstruksi Indonesia "Abiwada Rakai Penangkar" dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional;
63. Permohonan untuk membuka PENAS XIV Petani Nelayan Tahun 2014 dari Menteri Pertanian;
64. Permohonan audiensi dari Ketua Umum Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia;
65. Permohonan kesediaan untuk temu wicara dengan petani dan nelayan pada PENAS Petani Nelayan XIV Tahun 2014 di Kabupaten Malang dari Menteri Pertanian;
66. Permohonan audiensi dari Markas Besar LVR;
67. Permohonan memberikan sambutan pada acara Peluncuran Buku Bapak Presiden (SBY dan Kebebasan Pers. Testimoni Komunitas Media) dari Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia;
68. Permohonan audiensi dan kehadiran Presiden RI dalam HUT PGRI dari Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud;
69. Ucapan selamat serta permohonan kepada Presiden RI untuk membuka acara dan memberikan *Keynote Speech* pada Kongres XII Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dari Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional IAI;
70. Permohonan untuk membuka acara Rapimnas Kadin Tahun 2014 dari Ketua Umum KADIN;
71. Permohonan audiensi dari Presiden *Olympic Council of Asia (OCA)*, Syeikh Ahmad Al Fahad Al Sabah yang diajukan oleh Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia;
72. Usul rencana operasional 2014-2019 yang memuat sasaran pokok pengembangan sarana perhubungan dari Prof. DR Emil Salim;
73. Permohonan audiensi untuk melaporkan rencana pelaksanaan kegiatan *Workshop* dan *Talkshow* dengan judul "Tanah Untuk Infrastruktur" dari Ketua Umum KADIN;
74. Permohonan untuk memberikan sambutan dan membuka *Jakarta Food Security Summit* dari Ketua Umum KADIN; dan



75. Permohonan untuk memberikan sambutan dan membuka Musyawarah Nasional ke-XV Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dari Gubernur Jawa Barat.

Penyelenggaraan hubungan tersebut di atas didukung oleh berbagai kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2014, antara lain:

1. Penyelenggaraan Diskusi Panel/Diskusi Terbatas

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat serta penanganan pengaduan masyarakat, telah diselenggarakan beberapa kegiatan diskusi panel/diskusi terbatas yaitu antara lain:

- a. *Focus Group Discussion (FGD)* dengan tema "Optimalisasi Fungsi Penghubung Kementerian/Lembaga dengan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka memperlancar hubungan antara Pemerintah dengan DPR RI Periode 2014-2019, diselenggarakan pada tanggal 21 November 2014 bertempat di Kementerian Sekretariat Negara, dengan narasumber dari Sekretariat Komisi III dan Musyawarah Pimpinan DPR RI dan dihadiri oleh perwakilan dan penghubung dari unsur Sekretariat Jenderal MPR, DPR, DPD, Kementerian Hukum dan HAM, MA, MK, Polri, BNN, Komnas HAM, BNPT, KHN dan LPSK. Kegiatan dimaksud bertujuan untuk meningkatkan komunikasi guna membangun *network* (jaringan kerja) antara Kementerian Sekretariat Negara dengan Setjen DPR serta mitra kerja Komisi III DPR RI;
- b. Penyelenggaraan Sosialisasi Standar untuk Permohonan Audiensi atau Kehadiran, Bantuan dan Penyampaian Saran atau Masukan Pendapat kepada Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dari Ormas dan LSM di Provinsi Jawa Barat (6 Maret 2014), D.I.Yogyakarta (12 Juni 2014), Medan (23 September 2014), Jawa Tengah (9 Oktober 2014), dan Lampung (23 Oktober 2014);
- c. Penyelenggaraan Diskusi Terbatas dengan tema "Peranan Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Menyikapi Gerakan Radikalisme" pada tanggal 11 September 2014



di Surakarta, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dihadiri pejabat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta dan 30 perwakilan Ormas dan LSM di Kota Surakarta. Salah satu hasil utama diskusi tersebut adalah untuk mengantisipasi penyebaran paham radikalisme perlu ada tindakan pencegahan terus menerus dan berkesinambungan melalui kerjasama semua unsur pemerintah, masyarakat sipil dan aparat penegak hukum;

## 2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan koordinasi dengan lembaga negara, lembaga daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat serta penanganan pengaduan masyarakat, telah diselenggarakan beberapa kegiatan rapat koordinasi yaitu antara lain:

### a. Rapat Koordinasi Sekretariat Jenderal Antar Lembaga Negara

Pada tanggal 27 November 2014 bertempat di Bandung, Jawa Barat telah berlangsung Rapat Koordinasi Sekretaris Jenderal Antar Lembaga Negara yang dihadiri oleh perwakilan dari MPR, DPR, MA, MK, BI, dan Kementerian Sekretariat Negara;

### b. Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumentasi Pertemuan Presiden dengan Ketua Lembaga Negara pada tanggal 30 April 2014 di Ruang Rapat Deputi Hublemmas, dihadiri oleh perwakilan dari Setjen MPR, DPR, DPD, MA, BPK, dan Kementerian Sekretariat Negara;

### c. Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumentasi Pertemuan Presiden dengan Ketua Lembaga Negara pada tanggal 13 Oktober 2014 di Ruang Rapat Deputi Hublemmas, dihadiri oleh perwakilan dari Setjen MPR, MK, MA, BPK, KY, dan Kementerian Sekretariat Negara;

### d. Rapat koordinasi persiapan Penyelenggaraan *Sail Raja Ampat* Tahun 2014; dan

### e. Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan *World Coral Reef Conference* 2014 di Manado.



### 3. Penyusunan Buku

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan koordinasi dan komunikasi maka telah berhasil disusun buku sebagai berikut:

- a. Buku Dokumentasi Pertemuan Presiden dengan Ketua Lembaga Negara pada tanggal 20 Maret 2014 bertempat di Gedung MPR RI;
  - b. Buku Dokumentasi Pertemuan Presiden dengan Ketua Lembaga Negara pada tanggal 7 Juli 2014 bertempat di Gedung MPR RI;
  - c. Buku Dokumentasi Pertemuan Presiden dengan Ketua-ketua Lembaga Negara pada tanggal 18 Juli 2014 bertempat di Gedung MK RI;
  - d. Buku Kompilasi Profil Lembaga Negara (Rumpun Legislatif, Yudikatif dan Keuangan);
  - e. Buku Profil 10 LNS di Indonesia (*updating* 7 profil LNS) yang merupakan Buku Profil Lembaga Non Struktural Tahap V sehingga pada keseluruhan tahap (tahap I, II, III, IV dan V) telah disusun profil 85 LNS sesuai target; dan
  - f. Buku Profil Lembaga Daerah dan Organisasi Politik Provinsi Maluku dan Gorontalo.
4. Pidato Kenegaraan Presiden RI di depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI Tahun 2014, serta Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI pada Tanggal 15 Agustus 2014 di Gedung MPR/DPR/DPD.
  5. Menerima aspirasi dari pengunjuk rasa terkait permohonan penyelesaian proses pemberhentian Bupati Karo.
  6. Menerima aspirasi dari perwakilan karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines.
  7. Pemantauan dan peninjauan kegiatan Parpol Nasional Tahun 2014 antara lain kegiatan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa di Surabaya dan Rakernas DPP PDIP di Semarang.



8. Terselenggaranya audiensi Ormas dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden antara lain: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketua Umum Panitia Nasional Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1936, Panitia Nasional Umat Buddha Indonesia dalam rangka Perayaan Hari Raya Waisak, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ketua Badan Wakaf Indonesia, dan Sekretaris Jenderal Federasi Olahraga Rekreasi.

#### **b. Realisasi Anggaran**

Anggaran yang disediakan untuk mencapai IKU tersebut di atas adalah sebesar Rp1.354.696.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.104.173.399,- (81,51%). Secara umum rendahnya serapan anggaran disebabkan karena adanya kebijakan penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, dan efisiensi penyerapan anggaran

## **2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2014**

**“Terjaminnya kelancaran dukungan administrasi Presiden dan Wakil Presiden”**

Capaian kinerja sasaran strategis 2 ini diukur oleh IKU sebagai berikut:

- IKU 4: Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, TNI, dan Polri yang dilaksanakan sesuai standar;
- IKU 5: Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang dilaksanakan sesuai standar;
- IKU 6: Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti sesuai standar; dan
- IKU 7: Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri dan kerja sama teknik luar negeri yang diselesaikan sesuai standar.



Pada tahun 2014 capaian kinerja sasaran strategis 2 sebesar 107,39%. Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran strategis 2 sebesar Rp22.282.349.000,- dan realisasi sebesar Rp20.305.007.106,- (91,13%).

**Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 sebesar 107,39%., sedangkan realisasi sebesar 91,13%, hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran.**

Rincian capaian kinerja dan realisasi anggaran sasaran strategis 2 pada tabel berikut.

**Tabel 17**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 dan IKU Tahun 2014**

No.	Sasaran/IKU	Kinerja Tahun 2014			Anggaran Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
2.	Terjaminnya kelancaran dukungan administrasi Presiden dan Wakil Presiden	100%	107,39%	107,39%	Rp22.282.349.000	Rp20.305.007.106	91,13
	IKU 4. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, TNI, dan Polri yang dilaksanakan sesuai standar	100%	110,30%	110,30%	Rp2.372.539.000	Rp2.335.339.000	98,43
	IKU 5. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	100%	Rp 16.527.389.000	Rp 15.779.961.886	95,48
	IKU 6. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan /atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti sesuai standar	100%	117,77%	117,77%	Rp 367.856.000	Rp 354.821.100	96,46



No.	Sasaran/IKU		Kinerja Tahun 2014			Anggaran Tahun 2014		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
	IKU 7.	Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri dan kerja sama teknik luar negeri yang diselesaikan sesuai standar	100%	101,5%	101,5%	Rp 3.014.565.000	Rp 1.834.885.120	60,87

*Outcomes* dari sasaran strategis 2 adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya data dan informasi untuk pengambilan keputusan terkait dengan pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, dan pejabat lainnya yang digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden secara cepat, tepat, dan akurat.
- b. Data dan informasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat TNI dan Polri yang digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden secara cepat, tepat, dan akurat.
- c. menyajikan data dan informasi usul penganugerahan tanda jasa/kehormatan sebagai bahan sidang Dewan Tanda-tanda Jasa Kehormatan dengan cepat, tepat, dan akurat;
- d. mendukung pencapaian tujuan penugasan dinas luar negeri para pejabat/pegawai dan tenaga Indonesia lainnya dari Kementerian dan Lembaga serta terselenggaranya pemanfaatan kerja sama teknik luar negeri dengan mitra kerja sama;
- e. persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti secara efektif yang dapat menjadi bahan masukan dalam rangka perumusan kebijakan Presiden; dan
- f. meningkatkan transparansi dan aksesibilitas publik dalam proses penanganan administrasi Pejabat Negara, penganugerahan gelar dan tanda kehormatan, penanganan pengaduan masyarakat;



Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut di atas adalah sebesar Rp22.282.349.000,- dan realisasi sebesar Rp20.305.007.106,- (91,13%).

#### Analisis Capaian IKU 4

##### IKU 4

#### Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, TNI, dan POLRI yang dilaksanakan sesuai standar

Dalam rangka mengukur capaian IKU “Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, TNI, dan POLRI yang dilaksanakan sesuai standar” menggunakan formulasi sebagai berikut :

- **Formulasi Penghitungan:**

{ [ (  $\sum$  nilai variabel semua kegiatan pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun Pejabat Negara yang sesuai dengan standar / (  $\sum$  variabel x  $\sum$  kegiatan)) x 100 % ] + [ (  $\sum$  nilai variabel semua kegiatan pengangkatan Perwira Pertama, kenaikan pangkat, dan pemberhentian personil TNI dan Polri untuk pangkat Kolonel / Kombes dan Pati yang sesuai dengan standar) / (  $\sum$  variabel x  $\sum$  kegiatan)) x 100 % ] } / 2

- **Tipe Penghitungan:** Kumulatif

- **Sumber Data:** Standar Pelayanan / *Standard Operating Procedure*, agenda penomoran Keppres, memorandum pengajuan rancangan Keppres, lembar kerja pelaksanaan kegiatan

**a. Pencapaian IKU****Tabel 18**  
**Capaian IKU 4 Tahun 2014**

IKU	Kinerja Tahun 2014			Anggaran Tahun 2014		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, TNI, dan Polri yang dilaksanakan sesuai standar	100%	110,30%	110,30%	Rp2.372.539.000	Rp2.335.339.000	98,43

Pada tabel diatas terlihat, bahwa capaian kinerja IKU ini pada tahun 2014 memperoleh nilai 110,30%. Capaian ini mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena usulan tentang pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang tidak lengkap pada tahun 2014 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2013. Sehingga pada tahun 2014 lebih banyak Rancangan Keputusan Presiden yang diselesaikan lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan.

Dalam mendukung pencapaian IKU ini, Kementerian Sekretariat Negara telah:

- 1) Melaksanakan pelayanan administrasi pejabat negarayang menghasilkan *output* berupa Rancangan Keppres sebanyak 149, sebagian besar telah diselesaikan lebih cepat dari waktu standar pelayanan, yang di dalamnya memuat:



**Tabel 19**  
**Rancangan Keppres terkait Administrasi Pejabat Negara**

No.	Rancangan Keppres	Jumlah (Orang)
1.	Pengangkatan Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya	1.051 orang
2.	Pemberhentian Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya	963 orang
3.	Pensiun Pejabat Negara	490 orang

- 2) Melaksanakan pelayanan administrasi TNI dan POLRI yang dilaksanakan sesuai standar menghasilkan *output* berupa Rancangan Keppres sebanyak 93, Adapun rincian hasil Naskah Keputusan Presiden adalah sebagai berikut:

**Tabel 20**  
**Rancangan Keppres Terkait Administrasi TNI dan POLRI Tahun 2014**

No.	Naskah Keputusan Presiden Tentang	Jumlah
1	Pengangkatan Perwira Pertama	11
2	Kenaikan Pangkat ke Pamen/Pati	28
4	Pemberhentian dengan hormat Pamen/Pati	37
6	Pemberhentian karena meninggal	13
7	Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Kas Angkatan	2
8	Pemberhentian dan Pengangkatan Ajudan Presiden dan Wakil Presiden	2
<b>Total</b>		<b>93</b>



## b. Realisasi anggaran

Anggaran yang disediakan untuk mencapai IKU tersebut di atas adalah sebesar Rp2.372.539.000,- dengan realisasi sebesar Rp2.335.339.000,- (98,43%). Secara umum rendahnya serapan anggaran disebabkan karena adanya kebijakan penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, dan efisiensi penyerapan anggaran

## Analisis Capaian IKU 5

### IKU 5

**Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang dilaksanakan sesuai standar**

Dalam rangka mengukur capaian IKU “Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang dilaksanakan sesuai standar” menggunakan formulasi sebagai berikut :

- **Formulasi Penghitungan:**

$(\sum \text{nilai variabel semua kegiatan pemberian dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang sesuai dengan standar} / (\sum \text{variabel} \times \sum \text{kegiatan})) \times 100\%$

- **Tipe Penghitungan:** Kumulatif

- **Sumber Data:** Standar Pelayanan / *Standard Operating Procedure*, memorandum, lembar kerja pelaksanaan kegiatan



a. Pencapaian IKU

Tabel 21  
Capaian IKU 5 tahun 2014

IKU	Kinerja Tahun 2014			Anggaran Tahun 2014		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	100%	Rp16.527.389.000	Rp15.779.961.886	95,48

Dalam tahun 2014, capaian kinerja Kementerian Sekretariat Negara untuk dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang dilaksanakan sesuai standar adalah sebesar 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Pada tahun 2014, Kementerian Sekretariat Negara dalam menyelenggarakan penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang diselesaikan sesuai dengan standar telah menghasilkan Keputusan Presiden sebanyak 137 yang terdiri dari Penganugerahan Gelar Pahlawan, Tanda Kehormatan, dan Samkarya Nugraha, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 22

**Naskah Keppres Terkait Administrasi Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan**

No.	Naskah Keputusan Presiden Tentang	Jumlah Keputusan Presiden	Jumlah Penerima
1	Penganugerahan Gelar Pahlawan	2	5 Orang
2	Penganugerahan Tanda Kehormatan berupa Bintang	31	9.680 Orang
3	Penganugerahan Tanda Kehormatan berupa Satyalancana	102	284.950
4	Penganugerahan Tanda Jasa berupa Samkarya Nugraha	1	4 Kesatuan
5	Medali Kepeloporan	1	4 Orang
Total		137	294.639 Orang dan 4 Kesatuan

**b. Realisasi anggaran**

Anggaran yang disediakan untuk mencapai IKU tersebut di atas adalah sebesar Rp16.527.389.000,- dengan realisasi sebesar Rp15.779.961.886,- (95,48%). Secara umum rendahnya serapan anggaran disebabkan karena adanya kebijakan penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, dan efisiensi penyerapan anggaran.



## Analisis Capaian IKU 6

### IKU 6

#### Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti sesuai standar

Dalam rangka mengukur capaian IKU “Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti sesuai standar” menggunakan formulasi sebagai berikut :

- **Formulasi Penghitungan:**

$(\sum \text{nilai variabel semua kegiatan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti sesuai dengan standar} / (\sum \text{variabel} \times \sum \text{kegiatan})) \times 100\%$

- **Tipe Penghitungan:** Kumulatif

- **Sumber Data:** Standar Pelayanan/ *Standard Operating Procedure*, memorandum, lembar kerja pelaksanaan kegiatan

#### a. Pencapaian IKU

**Tabel 23**  
**Capaian IKU 6 Tahun 2014**

IKU	Kinerja Tahun 2014			Anggaran Tahun 2014		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan /atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti sesuai standar	100%	117,77%	117,77%	Rp367.856.000	Rp354.821.100	96,46



Pada tabel diatas terlihat, bahwa capaian kinerja IKU ini pada tahun 2014 memperoleh nilai 117,77%. Capaian ini mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya. Capaian kinerja yang melebihi target tersebut dikarenakan terdapat beberapa pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan lebih cepat dari waktu yang ditetapkan dalam standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Capaian tersebut diperoleh dari penghitungan terhadap kinerja penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 7.190 surat. Penanganan pengaduan masyarakat tersebut dilaporkan secara rutin setiap bulannya kepada Presiden serta laporan tahunan sehingga dalam satu tahun terdapat 13 laporan.

*Output* dari penanganan atas 7.190 surat dari masyarakat kepada Presiden tersebut dikelompokkan dalam empat kategori penanganan sebagai berikut:

1. Diteruskan kepada instansi terkait, sebanyak 1.544 surat;
2. Sebagai bahan pemantauan, sebanyak 2.683 surat;
3. Sebagai bahan informasi, sebanyak 2.366 surat;
4. Penyampaian apresiasi atas tanggapan dan sumbang saran dari masyarakat, sebanyak 597 surat.

**Tabel 24**  
**Jumlah Surat Pengaduan Masyarakat**  
**Berdasarkan Jenis Permasalahan Tahun 2014**

No.	Jenis Permasalahan	Jumlah Surat	Persentase
1	Penyalahgunaan Wewenang	75	1,04%
2	Pelayanan Masyarakat	432	6,01%
3	Korupsi/Pungli	612	8,51%
4	Kepegawaian/Ketenagakerjaan	2.010	27,96%
5	Pertanahan/Perumahan	1.748	24,31%
6	Hukum/Peradilan/HAM	1.554	21,61%
7	Kewaspadaan Nasional	118	1,64%



8	Tatalaksana/birokrasi	45	0,63%
9	Lingkungan Hidup	138	1,92%
10	Umum	458	6,37%
Jumlah		7.190	100%

Selain kegiatan pendukung tersebut di atas, guna penanganan pengaduan masyarakat dilakukan pula kegiatan sebagai berikut.

- a. Rapat penanganan pengaduan masyarakat terkait permasalahan TKI di luar negeri, dilaksanakan pada tanggal 2 September 2014 bertempat di Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Rapat ini menindaklanjuti permohonan pengadu, dalam hal ini keluarga TKI, yang menginginkan pemulangan TKI dan jenazah TKI di luar negeri, pemenuhan hak-hak TKI berupa asuransi tenaga kerja di luar negeri dan TKI yang hilang kontak.
- b. Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang terdiri dari Regional I pada tanggal 16 s.d. 18 Juni 2014 di Bali, Regional II pada tanggal 12 s.d. 14 Agustus 2014 di Manado, dan Regional III pada tanggal 26 s.d. 28 Agustus 2014 di Jambi. Kegiatan tersebut dihadiri peserta yang terdiri atas bupati/wakil bupati/walikota/wakil walikota, inspektur provinsi/kabupaten/kota Regional I, II, dan III, serta jajaran inspektorat Kementerian Teknis terkait. Berdasarkan hasil pemutakhiran data, pengaduan masyarakat yang telah diteruskan Kementerian Sekretariat Negara kepada instansi-instansi terkait di provinsi-provinsi dalam regional I, II, dan III telah ditindaklanjuti dan beberapa sedang dalam proses penanganan.
- c. Rapat penanganan pengaduan masyarakat terkait permohonan rehabilitasi dan hak pensiun bagi PNS yang terlibat G.30.S/PKI, dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2014 bertempat di Ruang Rapat Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM,



Sekretariat Kabinet, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara. Rapat menyepakati perlu dilakukan pencabutan Keppres Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C, yang akan diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Sekretaris Kabinet.

- d. Rapat penanganan pengaduan masyarakat terkait surat Prof. DR. E. Irwanur Latubual, M.M., M.H., Ph.D. yang mengaku sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Sumber Daya Alam, dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2014 bertempat di Ruang Rapat Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan. Rapat menyimpulkan bahwa pengakuan Prof. DR. E. Irwanur Latubual, M.M., M.H., Ph.D. sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Sumber Daya Alam dipastikan tidak benar, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan organisasi, kegiatan, maupun pejabat di lingkungan Lembaga Kepresidenan. Rapat menyepakati pihak Humas Kemensetneg akan menyampaikan klarifikasi pengaduan melalui *website* setneg.go.id.

#### **b. Realisasi anggaran**

Anggaran yang disediakan untuk mencapai IKU tersebut di atas adalah sebesar Rp367.856.000,- dengan realisasi sebesar Rp354.821.100,- (96,46%). Secara umum rendahnya serapan anggaran disebabkan karena adanya kebijakan penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, dan efisiensi penyerapan anggaran



## Analisis Capaian IKU 7

### IKU 7

#### Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri dan kerja sama teknik luar negeri yang diselesaikan sesuai standar

Dalam rangka mengukur capaian IKU “Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri dan kerja sama teknik luar negeri yang diselesaikan sesuai standar” menggunakan formulasi sebagai berikut:

- **Formulasi Penghitungan:**

$(\sum \text{nilai variabel semua kegiatan penyelesaian dokumen perjalanan dinas luar negeri dan kerja sama teknik luar negeri yang sesuai dengan standar} / (\sum \text{variabel} \times \sum \text{kegiatan})) \times 100\%$

- **Tipe Penghitungan:** Kumulatif

- **Sumber Data:** Standar Pelayanan / *Standard Operating Procedure*, memorandum, lembar kerja pelaksanaan kegiatan

#### a. Pencapaian IKU

**Tabel 25**  
**Capaian IKU 7 Tahun 2014**

IKU	Kinerja Tahun 2014			Anggaran Tahun 2014		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri dan kerja sama teknik luar negeri yang diselesaikan sesuai standar	100%	101,5%	101,5%	Rp3.014.565.000	Rp1.834.885.120	60,87%

Dalam mendukung pencapaian kinerja IKU tersebut, kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu:



- 1) Penyelesaian dokumen kerja sama teknik meliputi proyek, tenaga ahli dan beasiswa serta PDLN. Penyelesaian dokumen dimaksud terdiri dari 4 kategori, antara lain :
  - (a) Penyelesaian dokumen proyek KST (penyelesaian surat pertimbangan perjanjian Kerja Sama Teknik) sebanyak 93 surat dari permohonan sebanyak 93 berkas permohonan;
  - (b) penyelesaian administrasi penugasan tenaga ahli asing dalam kerangka KST. Untuk administrasi penugasan tenaga ahli asing (TA) dalam rangka kerja sama teknik terselesaikan sebanyak 1.402 surat persetujuan (mencakup 532 orang TA baru dan 951 orang TA perpanjangan) dari 1.402 berkas permohonan yang memenuhi persyaratan; dan
  - (c) pelaksanaan penanganan administrasi beasiswa luar negeri. Untuk penanganan administrasi beasiswa selesai sebanyak 617 surat penawaran dan 1.439 surat persetujuan yang mencakup 2.439 orang penerima beasiswa dari 36 Kementerian dan Lembaga, serta 1.367 orang asing yang berasal dari 82 negara sebagai penerima beasiswa unggulan dan beasiswa untuk negara berkembang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Perindustrian
  - (d) Sedangkan untuk penyelesaian penyiapan surat persetujuan PDLN dari semua kementerian dan lembaga, menyelesaikan total 18.221 surat Persetujuan PDLN yang mencakup total 31.957 orang yang disetujui dan 639 orang tidak disetujui ( $\pm 2\%$ ).
- 2) Penyelesaian rekomendasi fasilitas kerja sama teknik yang meliputi keimigrasian, perpajakan, kepabeanan dan kendaraan yang diterbitkan. Penyelesaian rekomendasi fasilitas KST terdiri dari 4 kategori, antara lain :
  - (a) Penyelesaian rekomendasi fasilitas kerja sama teknik bidang keimigrasian;
  - (b) Penyelesaian rekomendasi fasilitas kerja sama teknik bidang perpajakan;



- (c) Penyelesaian rekomendasi fasilitas kerja sama teknik bidang kepabeanan;
- (d) Penyelesaian rekomendasi fasilitas kerja sama teknik bidang kendaraan.

**Tabel 26**  
**Fasilitas KST**

No	Jenis Fasilitas	Jumlah Surat Rekomendasi		KL/ BI	Keterangan
		Disetujui	Ditolak		
1.	Keimigrasian	2.046	-	25 K/L 95 BI	4.310 orang
2.	Perpajakan	1.271	28	38 BI	
3.	Kepabeanan	393	3	41 BI	
4.	Duty Free Card	26	-	5 BI	
5.	Kendaraan	565	0	57 BI 59 PNA	58 Staf Diplomatik
		4.301	31	Total : 4.332 surat	

- 3) Pelaksanaan proyek/program, penugasan TA, pemanfaatan beasiswa dan fasilitas KST sesuai dengan kesepakatan, dimana terdiri dari kegiatan Rapat koordinasi kerja sama teknik terkait pembahasan perjanjian/dokumen program/proyek, tenaga ahli asing, beasiswa, fasilitas dan PDLN serta peraturan perundang-undangan dan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/proyek, tenaga ahli asing, beasiswa dan fasilitas.



4) Pelaksanaan kegiatan pembangunan kapasitas (*capacity building*) dan kegiatan pendukungnya dalam kerangka Program Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) Indonesia. Komponen kegiatannya yaitu:

(a) Pelaksanaan pelatihan dalam kerangka KTSS; dan

(b) Penerbitan publikasi sebagai kegiatan pendukungnya;

Dari 6 jenis pelatihan yang direncanakan, semua telah berhasil dilaksanakan. Pelatihan tersebut diikuti oleh 71 orang yang berasal dari berbagai negara berkembang di wilayah Asia Pasifik, Afrika dan Timur Tengah. Data jenis pelatihan terlampir dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 27**  
**Jenis Pelatihan KTSS**  
**Tahun 2014**

No.	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta	Keterangan
1	<i>TCTP on TV Documentary Program Production</i> , di Yogyakarta dan Bali, tgl 31 Agustus s.d 27 September 2014	12 orang	Dari 5 negara (Bhutan, Kamboja, Laos, Zambia dan Timor Leste) dengan biaya Pemerintah RI (MMTC dan Kemensetneg serta Mitra KST
2	<i>Training Course on Empowering Women Through Social, Economic, and Cultural Intervention</i> di Jakarta dan Bali, tgl 21-30 September 2014	16 orang	Dari 11 negara (Fiji, Srilanka, Maladewa, Iran, Vietnam, Filipina, Bhutan, Malaysia, Nepal, Myanmar dan Pakistan) dengan biaya Pemerintah RI serta Mitra KST (BKKBN dan Kemensetneg serta Mitra KST)



No.	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta	Keterangan
3	<i>TCTP on Rice Post Harvest Processing Technology for Afganistan</i> , di Jakarta dan Jawa Barat, tgl 9-22 November 2014	15 orang	Dari 1 negara dgn biaya Pem. RI (Kemsetneg-Kemtan) dan JICA
4	<i>TCTP on Strengthening District Planning in The Era Of Decentralization for Improvement of the hHealth Status of Children and Mothers Phase II</i> , di Jakarta tgl 14-20 September 2014	13 orang	Dari 4 negara (Kenya, Laos, Timor Leste dan Vietnam) dgn biaya Pem. RI (Kemsetneg-Kemenkes)
5	<i>International Training on Disaster Recovery and Mitigation for Coastal Area</i> , di Aceh, tgl 9-20 Oktober 2014	7 orang	Dari 2 negara (Fiji dan Timor Leste) dgn biaya dari Kemsetneg
6	<i>International Training on Strengthening of the Artificial Insemination to Achieve Food Security in The Republic of Timor Leste</i> , di Malang, tgl 26-8 November 2014	8 orang	Dari 1 negara ( Timor Leste) dgn biaya dari Kemsetneg dan Kemtan
	Total	71 orang	

#### b. Realisasi anggaran

Anggaran yang disediakan untuk mencapai IKU tersebut di atas adalah sebesar Rp3.014.565.000 dengan realisasi sebesar Rp1.834.885.120(60,87%). Secara umum rendahnya serapan anggaran disebabkan karena adanya kebijakan penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemoangan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran



Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, dan efisiensi penyerapan anggaran.

### 3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2014

“Meningkatnya kualitas pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan bagi Presiden dan Wakil Presiden”

Capaian kinerja sasaran strategis 3 ini diukur oleh IKU sebagai berikut:

- IKU 8: Persentase pelayanan administrasi kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan standar
- IKU 9: Persentase pelayanan administrasi keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden serta pengamanan VVIP sesuai dengan standar

Pada tahun 2014 capaian kinerja sasaran strategis 3 sebesar 103,58%. Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran strategis 3 sebesar Rp235.404.672.340,- dan realisasi sebesar Rp193.676.568.921,- (82,27%). **Capaian kinerja Sasaran Strategis 3 sebesar 103,58%, sedangkan realisasi sebesar 82,27%, hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran.**

Rincian capaian kinerja dan realisasi anggaran sasaran strategis 3 pada tabel berikut.



**Tabel 28**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 dan IKU Tahun 2014**

No.	Sasaran/IKU		Kinerja Tahun 2014			Anggaran Tahun 2014		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan bagi Presiden dan Wakil Presiden		100%	103,58%	103,58%	Rp235.404.672.340	Rp193.676.568.921	82,27
	IKU 8	Persentase pelayanan administrasi kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan standar	100%	100%	99,5%	Rp48.283.711.340	Rp41.071.890.771	85,06
	IKU 9	Persentase pelayanan administrasi keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden serta pengamanan VVIP sesuai dengan standar	100%	107,67%	107,67%	Rp187.120.961.000	Rp152.604.678.150	81,55

*Outcomes* dari sasaran strategis 3 adalah sebagai berikut:

- a. meningkatnya pelayanan administrasi kerumahtanggaan yang dilaksanakan sesuai standar untuk kegiatan/acara yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, Tamu Negara dan kegiatan penting lainnya sehingga dapat berjalan dengan baik, lancar, aman dan tertib;
- b. tersedianya instrumen untuk mengukur efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan tugas keprotokolan Presiden, Wakil Presiden, Isteri/Suami Presiden, Isteri/Suami Wakil Presiden, serta tamu negara;



- c. mempermudah koordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan kenegaraan kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan disusunnya buku acara kegiatan Presiden/Wakil Presiden; dan
- d. minimnya keluhan dari Presiden, Wakil Presiden, Istri/Suami Presiden, Istri/Suami Wakil Presiden.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut di atas adalah sebesar Rp235.404.672.340,- dan realisasi sebesar Rp193.676.568.921,- (82,27%).

### Analisis Capaian IKU 8

#### IKU 8

#### Persentase Pelayanan Administrasi Kerumahtanggaan Kepada Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Standar

Dalam rangka mengukur capaian IKU “Persentase Pelayanan Administrasi Kerumahtanggaan Kepada Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Standar” menggunakan formulasi sebagai berikut.

- **Formulasi Penghitungan:**

$$\left\{ \left[ \frac{\sum \text{nilai variabel semua kegiatan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden yang sesuai dengan standar}}{\sum \text{variabel} \times \sum \text{kegiatan}} \right] \times 100 \% \right] + \left[ \frac{\sum \text{nilai variabel semua kegiatan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden yang sesuai dengan standar}}{\sum \text{variabel} \times \sum \text{kegiatan}} \right] \times 100 \% \right\} / 2$$

- **Tipe Penghitungan:** Kumulatif

- **Sumber Data:** Standar Pelayanan/ *Standard Operating Procedure*, rekap acara, kegiatan pelayanan kerumahtanggaan, lembar kerja pelaksanaan kegiatan

**a. Pencapaian IKU****Tabel 29**  
**Capaian IKU 8 Tahun 2014**

IKU	Kinerja Tahun 2014			Anggaran Tahun 2014		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
Persentase Pelayanan Administrasi Kerumahtanggaan Kepada Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Standar	100%	99,50%	99,50%	Rp48.283.711.340	Rp41.071.890.771	85,06

Pada tabel diatas terlihat capaian kinerja IKU ini pada tahun 2014 memperoleh nilai 99,50%, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dan kegiatan yang tidak dilaksanakan. Dalam mendukung pencapaian IKU, Kementerian Sekretariat Negara telah:

- 1) Pada tahun 2014, Kementerian Sekretariat Negara telah melaksanakan pelayanan administrasi kerumahtanggaan yang dilaksanakan sesuai standar kepada Presiden dalam bentuk dukungan jamuan, tata graha, dekorasi dan kesenian serta peralatan upacara serta koleksi benda seni yang layak ditampilkan, dengan kegiatan berupa:
  - a) menyelenggarakan penyediaan dan pelayanan jamuan acara kenegaraan (acara Presiden dan Ibu Negara, Tamu Negara dan kegiatan penting lainnya) dan jamuan operasional lainnya dengan kualitas memuaskan;
  - b) melaksanakan kegiatan pemeliharaan lingkungan;
  - c) melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan dan penyiapan Peralatan/Perlengkapan Kesekretariatan/Acara/Upacara sesuai standar;



- d) melaksanakan Kegiatan Penyediaan dan Penyiapan Peralatan Acara Tamu Negara/Resmi/Penting Lainnya dengan tepat waktu dan sesuai arahan pimpinan;
- e) Melaksanakan kegiatan pengadaan dan penyiapan koleksi benda seni yang layak ditampilkan dalam setiap acara Presiden/Ibu Negara serta acara Kenegaraan lainnya di Lingkungan Sekretariat Presiden sesuai arahan pimpinan; dan
- f) Melaksanakan kegiatan pelayanan dan penyiapan dekorasi serta kesenian dalam rangka acara Presiden/Ibu Negara dan kegiatan kenegaraan lainnya di Lingkungan Sekretariat Kepresidenan sesuai arahan Pimpinan serta melaksanakan kegiatan-kegiatan restorasi benda-benda seni baik di Istana Jakarta maupun di Istana Kepresidenan di daerah (Bogor, Cipanas, Yogyakarta dan Tampasiring, Bali).

**Tabel 30**  
**Penyiapan Koleksi Benda Seni**

No.	Kelompok Barang Seni	Istana Kepresidenan (buah)				
		Jakarta	Bogor	Cipanas	Yogyakarta	Tampaksiring
1.	Alat musik tradisional/daerah	3.865	3	70	2	4
2.	Alat musik modern/band	22	4	13	12	17
3.	Alat musik lainnya					1
4.	Lukisan Cat Air	43		9		
5.	Sulaman/Tempelan			20		
6.	Lukisan Cat Minyak	592	701	294	423	189
7.	Lukisan lainnya				32	
8.	Wayang Golek			47		
9.	Barang bercorak kesenian lainnya			3		
10.	Pahatan Batu	32	47	14	67	65
11.	Pahatan Kayu	390	95	449	142	186



No.	Kelompok Barang Seni	Istana Kepresidenan (buah)				
		Jakarta	Bogor	Cipanas	Yogyakarta	Tampaksiring
12.	Pahatan Logam	32	84	16	3	7
13.	Pahatan lainnya			160	10	
14.	Maket/Miniatur/Replika			1		
15.	Barang Keramik/Gerabah			2		

2) Pada tahun 2014, Kementerian Sekretariat Negara telah melaksanakan pelayanan administrasi kerumahtanggaan yang dilaksanakan sesuai standar kepada Wakil Presiden berupa layanan jamuan, florist, dan kebutuhan kerumahtanggaan lainnya yang diberikan untuk mendukung acara/sidang/rapat/audiensi Wakil Presiden. Sifat pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden adalah *by order*. Sepanjang tahun 2014 tercatat sebanyak 796 kegiatan dukungan layanan kerumahtanggaan yang dapat diselenggarakan sesuai standar berdasarkan standar pelayanan/SOP dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 31**  
**Kegiatan Dukungan Layanan Kerumahtanggaan**  
**kepada Wakil Presiden Tahun 2014**

Kegiatan Wakil Presiden	Jumlah
Kunjungan Tamu Negara	1
Acara di Pusat (Jakarta)	490
Kunjungan Kehormatan/Audiensi	305
<b>TOTAL</b>	<b>796</b>

#### **b. Realisasi anggaran**

Anggaran yang disediakan untuk mencapai IKU tersebut di atas seluruhnya sebesar Rp48.283.711.340,- sedangkan realisasinya sebesar Rp41.071.890.771,- (85,06%). Secara umum rendahnya serapan anggaran disebabkan karena adanya kebijakan penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4



Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, dan efisiensi penyerapan anggaran

## Analisis Capaian IKU 9

### IKU 9

#### **Persentase Pelayanan Administrasi Keprotokolan Kepada Presiden dan Wakil Presiden serta Pengamanan VVIP Sesuai dengan Standar**

Dalam rangka mengukur capaian IKU “Persentase Pelayanan Administrasi Keprotokolan Kepada Presiden dan Wakil Presiden serta Pengamanan VVIP Sesuai dengan Standar” menggunakan formulasi sebagai berikut.

- **Formulasi Penghitungan:**

$$\left\{ \left[ \frac{\sum \text{nilai variabel semua kegiatan pelayanan keprotokolan kepada Presiden yang sesuai dengan standar}}{\sum \text{variabel} \times \sum \text{kegiatan}} \right] \times 100 \% \right] + \left[ \frac{\sum \text{nilai variabel semua kegiatan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden yang sesuai dengan standar}}{\sum \text{variabel} \times \sum \text{kegiatan}} \right] \times 100 \% \right] + \left[ \frac{\sum \text{nilai variabel semua kegiatan pengkoordinasian pengamanan VVIP yang sesuai dengan standar}}{\sum \text{variabel} \times \sum \text{kegiatan}} \right] \times 100 \% \right\} / 3$$

- **Tipe Penghitungan:** Kumulatif

- **Sumber Data:** Standar Pelayanan/ *Standard Operating Procedure*, rekap acara, kegiatan pelayanan keprotokolan, buku rekapitulasi pelaksanaan kegiatan VVIP, agenda penomoran Takah Acara VVIP, lembar kerja pelaksanaan kegiatan

**a. Pencapaian IKU****Tabel 32**  
**Capaian IKU 9 Tahun 2014**

IKU	Kinerja Tahun 2014			Anggaran Tahun 2014		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
Persentase Pelayanan Administrasi Keprotokolan Kepada Presiden dan Wakil Presiden serta Pengamanan VVIP Sesuai dengan Standar	100%	107,67%	107,67%	Rp187.120.961.000	Rp152.604.678.150	81,55

Dalam tahun 2014, capaian kinerja Kementerian Sekretariat Negara untuk pelayanan administrasi keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden serta pengamanan VVIP sesuai dengan standar adalah sebesar 107,67%.

Pada tahun 2014, Kementerian Sekretariat Negara telah melaksanakan pelayanan administrasi keprotokolan kepada Presiden dengan memberikan pelayanan keprotokolan kepada Presiden/Ibu Negara, Tamu Negara dan kegiatan penting lainnya baik untuk acara-acara rutin yang dilaksanakan di kantor Presiden/Istana Kepresidenan di Jakarta, acara pelantikan, audiensi dan acara-acara *credential* lainnya serta kunjungan Tamu Negara serta kunjungan Presiden dan Ibu Negara beserta rombongan ke daerah dan ke luar negeri dan kegiatan sewa/charter pesawat Kepresidenan. Kegiatan Presiden tahun 2014 sebanyak 607 dan Ibu Negara sebanyak 198 yang terselenggara sesuai standar.

Kegiatan keprotokolan ini juga mencakup kegiatan-kegiatan yang mendukung keprotokolan yang dilaksanakan di Istana-istana



Kepresidenan di daerah (Bogor, Cipanas, Yogyakarta dan Tampaksiring-Bali), dengan kegiatan antara lain:

- (a) menyelenggarakan acara Kenegaraan yang dipimpin Presiden dan atau Ibu Negara yang mendapat dukungan keprotokolan;
- (b) menyelenggarakan dukungan layanan keprotokolan pelaksanaan acara HUT RI;
- (c) menyelenggarakan perjalanan dinas Presiden dan atau Ibu Negara di dalam negeri dan ke luar negeri serta kunjungan tamu negara di dalam negeri yang mendapat dukungan keprotokolan;
- (d) menyelenggarakan dukungan layanan *charter* pesawat dalam rangka perjalanan dinas Presiden dan atau Ibu Negara; dan
- (e) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Istana-istana Kepresidenan di daerah yang mendukung kegiatan keprotokolan antara lain jamuan kenegaraan, dekorasi dan kesenian.

Berikut adalah kegiatan yang mendapat dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Ibu Negara pada tahun 2014:

**Tabel 33**  
**Kegiatan Dukungan Layanan Keprotokolan kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2014**

NO.	KEGIATAN ACARA	JUMLA H
1.	Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, Konferensi dll	10
2.	Pertemuan/Silaturahmi/Pengarahan/Pembekalan	38
3.	Presentasi, Paparan, <i>Presidential Lecture</i> , Pidato	13
4.	Peresmian Pameran/Gedung/ <i>Launching</i> /Peluncuran, dan lain-lain	42
5.	Pencanangan dan Penyerahan Penghargaan/Anugerah	3
6.	Pelantikan/ Pengukuhan	14
7.	Peringatan Hari-hari Besar/Nasional	24
8.	Menyaksikan Pergelaran Kesenian/Pertandingan Olah Raga	4



<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN ACARA</b>	<b>JUMLAH</b>
9.	Kunjungan ke instansi pemerintah dan perusahaan swasta	2
10.	Akad Nikah/Resepsi	17
11.	Sidang/Rapat/Pertemuan Konsultasi	43
12.	Kenegaraan/Credential	4
13.	Menerima Tamu Asing	16
14.	Menerima Pejabat RI/Tim atau Badan Pemerintah	131
15.	Menerima Pimpinan Kantor Swasta/ Ormas/Orpol/Tokoh Masyarakat	79
16.	Wawancara/Rekaman/Konferensi Pers	19
17.	Kunjungan Tamu Negara	4
18.	Kunjungan kerja ke daerah	41
19.	Kunjungan Kerja ke luar negeri	6
	<b>Jumlah Seluruh Kegiatan</b>	<b>510</b>

**Tabel 34**  
**Kegiatan Dukungan Layanan Keprotokolan kepada Ibu Negara**  
**Ibu Hj. Ani Bambang Yudhoyono Tahun 2014**

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN ACARA</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Acara Resmi	11
2.	Mendampingi Presiden pada acara-acara khusus/besar	63
3.	Mendampingi Presiden pada Kunjungan Tamu Negara	1
4.	Mendampingi Presiden pada acara Resepsi/Akad Nikah	16
5.	Menerima audiensi Ormas/swasta/perorangan	5



NO.	KEGIATAN ACARA	JUMLAH
6.	Wawancara/Rekaman/Pengambilan Gambar	2
7.	Acara Tidak Resmi/Intern	25
8.	Kunjungan ke daerah dan mendampingi Presiden pada Kunjungan Kerja ke Daerah	43
9.	Mendampingi Presiden pada Kunjungan Kerja ke Luar Negeri	6
10.	Kunjungan ke Luar Negeri	-
	<b>Jumlah Seluruh Kegiatan</b>	<b>172</b>

**Tabel 35**  
**Kegiatan Dukungan Layanan Keprotokolan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo periode 20 Oktober s.d. 10 Desember 2014 Tahun 2014**

NO.	KEGIATAN ACARA	JUMLAH
1.	Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, Konferensi dll	2
2.	Menerima Tamu Asing	11
3.	Menerimai Pejabat RI/Tim atau Badan Pemerintah	45
4.	Menerima Pimpinan Kantor Swasta/Ormas/Orpol/Tokoh Masyarakat	16
5.	Wawancara/Rekaman/Konferensi Pers	7
6.	Kunjungan Tamu Negara	4
7.	Kunjungan kerja ke daerah	9
8.	Kunjungan Kerja ke luar negeri	3
	<b>Jumlah Seluruh Kegiatan</b>	<b>97</b>



**Tabel 36**  
**Kegiatan Dukungan Layanan Keprotokolan kepada Ibu Negara**  
**Ibu Hj. Iriana Widodo Tahun 2014**

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN ACARA</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Acara Resmi	2
2.	Mendampingi Presiden pada acara-acara khusus/besar	11
3.	Mendampingi Presiden pada acara Resepsi/Akad Nikah	1
4.	Acara Tidak Resmi/Intern	1
5.	Kunjungan ke daerah dan mendampingi Presiden pada Kunjungan Kerja ke Daerah	5
6.	Mendampingi Presiden pada Kunjungan Kerja ke Luar Negeri	3
	<b>Jumlah Seluruh Kegiatan</b>	<b>23</b>

- 1) Pada tahun 2014, Kementerian Sekretariat Negara telah melaksanakan pelayanan administrasi keprotokolan kepada Wakil Presiden yang diberikan dalam rangka mendukung seluruh acara Wakil Presiden baik yang sifatnya resmi maupun tidak resmi. Pelayanan keprotokolan bersifat *by order*. Sepanjang tahun 2014 tercatat sebanyak 851 kegiatan dukungan layanan keprotokolan yang dapat diselenggarakan sesuai standar berdasarkan standar pelayanan/SOP dengan rincian sebagai berikut.



**Tabel 37**  
**Kegiatan Dukungan Layanan Keprotokolan Kepada Wakil Presiden Tahun 2014**

<b>Kegiatan Wakil Presiden</b>	<b>Jumlah</b>
Kunjungan Tamu Negara	1
Kunjungan ke Luar Negeri	4
Kunjungan Kerja ke Daerah	51
Acara di Pusat (Jakarta)	490
Kunjungan Kehormatan/Audiensi	305
<b>TOTAL</b>	<b>851</b>

2) Pada tahun 2014, Kementerian Sekretariat Negara telah melaksanakan pengamanan VVIP termasuk pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta Ibu baik di Jakarta, daerah maupun luar negeri dan pengamanan kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asingsesuai dengan standar. Berikut adalah rekapitulasi kegiatan pengamanan tahun 2014:

**Tabel 38**  
**Rekapitulasi Kegiatan Pengamanan Presiden beserta Ibu dan Wakil Presiden beserta Ibu Tahun 2014**

<b>Kegiatan Pengamanan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Pengamanan Presiden beserta Ibu</b>	<b>277</b>
• Jakarta	202
• Daerah	66
• Luar Negeri	9
<b>Pengamanan Wakil Presiden beserta Ibu</b>	<b>321</b>
• Jakarta	261
• Daerah	56



Kegiatan Pengamanan	Jumlah
• Luar Negeri	4
<b>Pengamanan kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan Negara Asing</b>	<b>27</b>

### b. Realisasi anggaran

Anggaran yang disediakan untuk mencapai IKU tersebut di atas seluruhnya sebesar Rp187.120.961.000,-, sedangkan realisasi seluruhnya sebesar Rp152.604.678.150,- (81,55%). Secara umum rendahnya serapan anggaran disebabkan karena adanya kebijakan penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, dan efisiensi penyerapan anggaran.

## C. Perbandingan Capaian IKU

### 1. Terhadap Tahun 2013

**Tabel 39**  
**Perbandingan Capaian IKU Tahun 2014 dan 2013**

No.	IKU	Tahun 2013			Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase rekomendasi hasil analisis di bidang kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang dirumuskan sesuai standar	100%	98,53%	98,53%	100%	100%	100%



No.	IKU	Tahun 2013			Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2.	Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden yang dilaksanakan sesuai standar	100%	119,76%	119,76%	100%	117,16%	117,16%
4	Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, TNI, dan Polri yang dilaksanakan sesuai standar	100%	111,63%	111,63%	100%	110,30%	110,30%
5	Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan /atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti sesuai standar	100%	113,09%	113,09%	100%	117,77%	117,77%



No.	IKU	Tahun 2013			Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
7	Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri dan kerja sama teknik luar negeri yang diselesaikan sesuai standar	100%	96,80%	96,80%	100%	101,50%	101,50%
8	Persentase Pelayanan Administrasi Kerumahtanggaan Kepada Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Standar	100%	100%	100%	100%	99,50%	99,50%
9	Persentase Pelayanan Administrasi Keprotokolan Kepada Presiden dan Wakil Presiden serta Pengamanan VVIP Sesuai dengan Standar	100%	100%	100%	100%	107,67%	107,67%

Terhadap perbandingan capaian IKU pada tahun 2014 dengan tahun 2013 tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja IKU “Persentase rekomendasi hasil analisis di bidang kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang dirumuskan sesuai standar” pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 1,47% dari yang sebelumnya pada tahun 2013 sebesar 98,53% menjadi 100%, hal ini disebabkan karena kegiatan yang sudah direncanakan dapat terlaksana seluruhnya sesuai dengan standar ketepatan waktu yang telah ditetapkan dalam SOP (*Standard Operating Procedure*).



- b. Capaian kinerja IKU “Persentase hasil analisis dan penyelesaian rancangan perundang-undangan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai dengan” baik untuk tahun 2014 maupun tahun 2013, capaiannya adalah sama yaitu 100%.
- c. Capaian kinerja IKU “Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden yang sesuai dengan standar” pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 2,6% dari yang sebelumnya pada tahun 2013 sebesar 119,76% menjadi 117,16%, hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah memorandum yang harus dibuat yaitu bertambah sebanyak 28 memorandum dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- d. Capaian kinerja IKU “Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, TNI, dan Polri yang dilaksanakan sesuai dengan standar” pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 1,33% dari yang sebelumnya pada tahun 2013 sebesar 111,63% menjadi 110,30%, hal ini disebabkan karena usulan tentang pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang tidak lengkap pada tahun 2014 lebih banyak dibandingkan dengan pada tahun 2013. Sehingga pada tahun 2014 lebih banyak Rancangan Keputusan Presiden yang diselesaikan lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan.
- e. Capaian kinerja IKU “Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar” baik untuk tahun 2014 maupun tahun 2013, capaiannya adalah sama yaitu 100%.
- f. Capaian kinerja IKU “Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan Wakil Presiden yang ditindaklanjuti sesuai dengan standar” pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 4,68% dari yang sebelumnya pada tahun 2013 sebesar 113,09%



menjadi 117,77%, hal ini disebabkan karena pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti dapat terlaksana lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

- g. Capaian kinerja IKU “Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri dan kerja sama teknik luar negeri yang diselesaikan sesuai standar” pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 4,7% dari yang sebelumnya pada tahun 2013 sebesar 96,80% menjadi 101,50%.
- h. Capaian kinerja IKU “Persentase pelayanan kerumahtangaan kepada Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan standar” pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,5% dari yang sebelumnya pada tahun 2013 sebesar 100% menjadi 99,50%, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dan kegiatan yang tidak dilaksanakan.
- i. Capaian kinerja IKU “Persentase pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden serta pengamanan VVIP sesuai dengan standar” pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 7,67% dari yang sebelumnya pada tahun 2013 sebesar 100% menjadi 107,67%.

## 2. Selama periode Renstra 2010-2014

Sehubungan dengan adanya perubahan rumusan IKU di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2013, maka capaian kinerja IKU tahun 2010 s.d. 2011 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2012 s.d. 2014. Namun demikian dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja IKU Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2010 dan 2011 adalah sebagaimana pada tabel berikut:



**Tabel 40**  
**Perbandingan Capaian Kinerja IKU Tahun 2010 dan 2011**

Indikator Kinerja	Tahun 2010			Tahun 2011		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase rekomendasi hasil analisis di bidang kebijakan yang disetujui oleh Presiden dan Wakil Presiden	91%	82,25%	90,38%	94%	83%	89%
Persentase hasil analisis atas rancangan peraturan perundang-undangan yang diajukan kepada Presiden dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan/disahkan Presiden	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakat yang disetujui Presiden	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	91%	82,25%	90,38%	94%	83%	89%
Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase surat persetujuan pemerintah atas dokumen kerjasama teknik luar negeri yang diselesaikan sesuai dengan standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pelayanan administrasi kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan standar	95%	93,61%	98,54%	93%	93%	100%



Indikator Kinerja	Tahun 2010			Tahun 2011		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase pelayanan administrasi keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden serta pengamanan VVIP sesuai dengan standar	95%	93,61%	98,54%	95%	95%	100%

Terhadap perbandingan capaian IKU pada tahun 2011 dengan tahun 2010 tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Capaian kinerja IKU “Persentase rekomendasi hasil kajian di bidang kebijakan yang disetujui oleh Presiden dan Wakil Presiden” pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 2,09% dari yang sebelumnya pada tahun 2010 sebesar 90,38% menjadi 88,29%, hal ini disebabkan penyelesaian rekomendasi dan laporan disesuaikan dengan kebutuhan pada tahun yang bersangkutan dan terdapat hal diluar kendali. Pada tahun 2010 tercapai 1.862 rekomendasi sedangkan pada tahun 2011 tercapai 1.654 rekomendasi.
- 2) Capaian kinerja IKU “Persentase hasil analisis atas rancangan peraturan perundang-undangan yang diajukan kepada Presiden dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan/disahkan Presiden” baik untuk tahun 2011 maupun tahun 2010, capaiannya adalah sama yaitu 100%. Capaian IKU tahun 2010 berbeda dengan capain IKU tahun 2011, yakni pada tahun 2010 adalah berupa permohonan untuk penetapan dan pengesahan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian permasalahan hukum (hak prerogatif Presiden) sedangkan tahun 2011 berupa hasil analisis atas rancangan peraturan perundang-undangan yang diajukan kepada Presiden dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan/disahkan Presiden. Pada tahun 2010 tercapai 341 permohonan sedangkan pada tahun 2011 tercapai penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan sebanyak 24 UU, 79 PP, dan 77 Pertimbangan RPerpres.



- 3) Capaian kinerja IKU “Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang disetujui Presiden” pada tahun 2011 sama dengan tahun 2010 yaitu tercapai 100%. Pada tahun 2010 tercapai 216 laporan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan, sedangkan pada tahun 2011 tercapai 151 laporan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan.
- 4) Capaian kinerja IKU “Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, TNI, dan POLRI yang disetujui oleh Presiden” pada tahun 2011 sama dengan tahun 2010 yaitu tercapai 100%. Pada tahun 2010 tercapai 226 Keppres sedangkan pada tahun 2011 tercapai 162 Keppres.
- 5) Capaian kinerja IKU “Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden” pada tahun 2011 sama dengan tahun 2010 yaitu tercapai 100%. Pada tahun 2010 tercapai 217.640 orang sedangkan pada tahun 2011 tercapai 237.006 orang.
- 6) Capaian kinerja IKU “Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden yang ditindaklanjuti” pada tahun 2011 sama dengan tahun 2010 yaitu tercapai 100%. Pada tahun 2010 tercapai 3.678 surat/berkas sedangkan pada tahun 2011 tercapai 4.341 surat/berkas
- 7) Capaian kinerja IKU “Persentase surat persetujuan pemerintah atas dokumen kerjasama teknik luar negeri yang diselesaikan sesuai dengan standar” pada tahun 2011 sama dengan tahun 2010 yaitu tercapai 100%. Pada tahun 2010 tercapai 24.832 dokumen sedangkan pada tahun 2011 tercapai 24.859 dokumen.
- 8) Capaian kinerja IKU “Persentase pelayanan administrasi kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan standar” mengalami peningkatan sebesar 1,46% pada tahun 2011, dari yang sebelumnya pada tahun 2010 sebesar 98,54% menjadi 100%. Pada tahun 2010 tercapai 772 Kegiatan layanan kerumahtanggaan Kepada Presiden dan 691 Kegiatan layanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden, sedangkan tahun 2011 tercapai 814 kegiatan layanan



kerumahtangaan Presiden dan 673 Kegiatan layanan kerumahtangaan kepada Wakil Presiden.

- 9) Capaian kinerja IKU “Persentase pelayanan administrasi keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden serta pengamanan VVIP sesuai dengan standar” mengalami peningkatan sebesar 1,46% pada tahun 2011, dari yang sebelumnya pada tahun 2010 sebesar 98,54% menjadi 100%. Pada tahun 2010 tercapai 772 Kegiatan layanan keprotokolan Kepada Presiden, 739 Kegiatan layanan keprotokolan kepada Wakil Presiden dan 717 kegiatan pengamanan VVIP sedangkan pada tahun 2011 tercapai 814 kegiatan layanan keprotokolan kepada Presiden, 732 Kegiatan layanan keprotokolan kepada Wakil Presiden, dan 711 kegiatan pengamanan VVIP.

b. Capaian IKU Tahun 2012 s.d 2014

Capaian IKU pada tahun 2012 s.d 2014 adalah sebagai berikut:

**Tabel 41**  
**Perbandingan Capaian Kinerja IKU Tahun 2012 s.d. 2014**

No.	IKU	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase rekomendasi hasil analisis di bidang kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang dirumuskan sesuai standar	100%	99,44%	99,44%	100%	98,53%	98,53%	100%	100%	100%
2.	Persentase hasil analisis dan penyelesaian rancangan perundang-undangan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai dengan standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No.	IKU	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3.	Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakat kepada Presiden yang sesuai dengan standar	100%	107,71%	107,71 %	100%	119,76%	119,76 %	100%	117,16%	117,16%
4.	Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, TNI, dan Polri yang dilaksanakan sesuai dengan standar	100%	100%	100%	100%	111,63%	111,63 %	100%	110,30%	110,30%
5.	Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan Wakil Presiden yang ditindaklanjuti sesuai dengan standar	100%	100,16%	100,16 %	100%	113,09%	113,09 %	100%	117,77%	117,77%
7.	Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri dan kerja sama teknik luar negeri yang diselesaikan sesuai standar	100%	107%	107%	100%	96,80 %	96,80%	100%	101,50%	101,50%



No.	IKU	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
8.	Persentase pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan standar	100%	98,75%	98,75%	100%	100%	100%	100%	99,50%	99,50%
9.	Persentase pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden serta pengamanan VVIP sesuai dengan standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	107,67%	107,67%

#### D. Kendala Dan Langkah Mengatasinya

Pada tahun 2014, Pencapaian IKU rata – rata telah memenuhi target yang ditetapkan, namun demikian pelaksanaan program dan kegiatan masih menghadapi kendala, antara lain:

1. Permohonan kepada Presiden/Menteri Sekretaris Negara seringkali disampaikan dalam waktu yang sangat dekat dengan waktu pelaksanaan acara kepresidenan. Upaya mengatasi kendala ini adalah meningkatkan koordinasi secara proaktif dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri dalam rangka mendukung kelancaran pengumpulan dan pengolahan data, pemantauan atas permasalahan dan pelaksanaan kebijakan dalam negeri dan hubungan internasional dan meningkatkan kemampuan pejabat/staf untuk segera merespon kendala dimaksud.



2. Adanya acara Presiden/Ibu Negara serta acara besar lainnya yang sulit diprediksi dan dinamis, sehingga kegiatan yang telah direncanakan mengalami perubahan. Langkah mengatasi kendala dimaksud adalah melaksanakan petunjuk dan arahan Presiden dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak terkait secara optimal.
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Langkah mengatasi kendala dimaksud adalah memaksimalkan pengembangan kualitas SDM melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang tersedia baik di dalam maupun luar negeri.
4. Jumlah *input* (surat masuk) yang harus diselesaikan meningkat secara signifikan dalam kurun waktu bulan Oktober sampai dengan Desember 2014 atau setelah dilantiknya Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia sementara kuantitas Sumber Daya Manusia masih kurang. Upaya mengatasi kendala ini adalah dengan mengoptimalkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang sudah ada, penambahan jam kerja, dan penambahan jumlah Sumber Daya Manusia dalam rangka menyeimbangkan kuantitas dengan beban kerja.

## **E. Akuntabilitas Keuangan**

Pada tahun 2014, Kementerian Sekretariat Negara melaksanakan 3 Program dengan didukung anggaran sebesar Rp1.195.761.639.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.015.741.571.385,- (85%), dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 42

**Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Sekretariat Negara  
per Program Tahun 2014**

No.	Program	Anggaran Tahun 2014		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara	335.475.423.000	258.373.539.103	77,02
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Negara	851.529.800.000	751.003.800.751	88,19
3.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden	8.756.416.000	6.364.231.531	72,68
	Total	1.195.761.639.000	1.015.741.571.385	85%

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis beserta IKU seperti yang terdapat pada dokumen Penetapan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp268.112.107.340,- dengan realisasi sebesar Rp222.636.326.932,- (83%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43

**Akuntabilitas Keuangan Per-sasaran dan Per-IKU Tahun 2014**

No	Sasaran	IKU	Anggaran (Rp)		
			Pagu	Realisasi	%
1.	Terselenggaranya dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan dengan baik dan lancar		10.425.086.000	8.654.750.905	83,02
		Persentase rekomendasi hasil analisis di bidang kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang dirumuskan sesuai standar	8.492.471.000	7.154.796.581	84,25



No	Sasaran	IKU	Anggaran (Rp)		
			Pagu	Realisasi	%
		Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai standar	577.919.000	395.780.925	68,48
		Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden yang dilaksanakan sesuai standar	1.354.696.000	1.104.173.399	81,51
2.	Terjaminnya kelancaran dukungan administrasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden		22.282.349.000	20.305.007.106	91,13
		Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, TNI, dan Polri yang dilaksanakan sesuai standar	2.372.539.000	2.335.339.000	98,43
		Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang dilaksanakan sesuai standar	16.527.389.000	15.779.961.886	95,48
		Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan /atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti sesuai standar	367.856.000	354.821.100	96,46
		Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri dan kerja sama teknik luar negeri yang diselesaikan sesuai standar	3.014.565.000	1.834.885.120	60,87%



No	Sasaran	IKU	Anggaran (Rp)		
			Pagu	Realisasi	%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan bagi Presiden dan Wakil Presiden		235.404.672.340	193.676.568.921	82,27
		Persentase pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden sesuai standar	48.283.711.340	41.071.890.771	85,06
		Persentase pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden serta pengamanan VVIP sesuai standar	187.120.961.000	152.604.678.150	81,55

Penyerapan anggaran sebesar 83% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut.

1. Adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran;
2. Pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga terkait telah lengkap dan komprehensif yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi. Oleh karena itu anggaran yang tersedia untuk melakukan pemantauan atas kelayakan permohonan kegiatan/acara kepresidenan di dalam dan luar negeri tidak terserap, namun target kinerja dapat tercapai.

## F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2013 telah dimanfaatkan antara lain dengan melaksanakan dan merencanakan kegiatan pada tahun 2014 sebagai berikut.



## 1. Perencanaan Kinerja

### a. Riviui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2014

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara, pada tahun 2014, Kementerian Sekretariat Negara telah menyelenggarakan *riviui* terhadap Indikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara agar berorientasi *outcome*.

### b. Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK)

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, seluruh K/L diamanatkan untuk membangun ADIK. Kementerian Sekretariat Negara sedang menyelenggarakan penyusunan ADIK. Data ADIK ini kemudian akan digunakan sebagai acuan satuan organisasi/satuan kerja dan unit kerja dalam menyusun Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran serta Penetapan Kinerja untuk periode 2015-2019. Diharapkan dengan adanya data ADIK dapat meningkatkan keselarasan data dan digunakan sebagai acuan untuk berbagai dokumen yang diminta oleh berbagai K/L.

### c. Evaluasi Program dan Kegiatan

Kementerian Sekretariat Negara memiliki tiga program yaitu:

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Negara; dan
- 3) Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Ketiga program tersebut telah dilakukan evaluasi program dan kegiatan pada tingkat Satuan Organisasi.

### d. Pembentukan Tim untuk penyusunan draf awal Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019.



## 2. Peningkatan Kinerja

### a. Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi (SMKO)

Pada tahun 2014, Kementerian Sekretariat Negara mengadakan beberapa kegiatan terkait dengan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi sebagai berikut.

- Kegiatan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 2 April 2014, bertempat di Bogor, Jawa Barat. Acara tersebut diikuti oleh para manajer kinerja serta pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebanyak 30 orang. Agenda rapat koordinasi tersebut adalah paparan Peraturan Menteri Sekretaris Negara (Permensesneg) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan pelatihan kepada manajer kinerja dan operator dalam menjalankan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi.

**Tabel 44**

**Manajer Kinerja periode Januari – Desember 2014 sesuai**

**Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 22 Tahun 2014**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Agussalim, S.IP., M.P.P.	Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja I, Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia	Manajer Kinerja pada Deputi Bidang Sumber Daya Manusia merangkap Manajer Kinerja pada Kementerian
2	M. Ari Setiawan, S.E., M.M.	Kepala Bagian Perencanaan, Biro Administrasi, Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden	Manajer Kinerja pada Sekretariat Presiden



No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
3	Susi Susanti, S.H.	Kepala Bagian Kepegawaian, Biro Tata Usaha dan Kepegawaian, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden	Manajer Kinerja pada Sekretariat Wakil Presiden
4	Aida Kusuma, S.Pd., M.Si.	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden	Manajer Kinerja pada Sekretariat Militer Presiden
5	Sari Harjanti, S.IP.,M.Si	Kepala Bagian Persuratan dan Reproduksi, Biro Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian	Manajer Kinerja pada Sekretariat Kementerian
6	Janawir, S.Si., M.Si	Kepala Bidang Pengembangan Sistem dan Jaringan, Asisten Deputi Dukungan Data Kebijakan dan Informatika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan	Manajer Kinerja pada Deputi Bidang Dukungan Kebijakan
7	Pranggono Dwianto, S.IP., M.Si.	Kepala Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Kesamaan Agama dan Fungsi, Asisten Deputi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	Manajer Kinerja pada Deputi Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
8	Drs.Harjono	Kepala Bidang Distribusi, Publikasi, dan Dokumentasi, Asisten Deputi Hukum, Deputi Bidang Perundang-Undangan	Manajer Kinerja pada Deputi Bidang Perundang-undangan



- *Workshop* Sistem Manajemen Kinerja Organisasi yang diselenggarakan pada tanggal 29 s.d 30 April 2014, dan 5 s.d 6 Mei 2014, tujuan dari *workshop* ini ialah untuk lebih memperdalam materi substansi secara teknis dan juga mencari solusi dalam permasalahan yang ada selama implementasi sistem manajemen kinerja organisasi, selain itu juga dilakukan pengembangan terhadap sistem yaitu penambahan unsur anggaran selain unsur kinerja.

b. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

1) Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2014

Pada tahun 2014, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dan PNS Kementerian Sekretariat Negara yang melaksanakan tugas pada Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olah Raga Bung Karno, Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, dan Sekretariat Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2014. SKP memuat Kegiatan Tugas Jabatan (KTJ), angka kredit, dan target yang meliputi aspek kuantitas/*output*, kualitas/*mutu*, waktu, dan/atau biaya berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK).

2) Monitoring dan Evaluasi SKP Semester I Tahun 2014

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKP secara semesteran sesuai dengan pasal 34 Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Kegiatan ini dilakukan menggunakan sarana teknologi informasi yaitu pada Aplikasi Penilaian Kinerja pada SIMSDM.



### Gambar 6

## Tampilan Menu Monitoring pada Aplikasi Penilaian Kinerja di SIMSDM

Andie Noegroho, S.Kom., S.AB., M.T.I. Beranda PPK Proses Data Pegawai Report

**Penilaian Sasaran Kerja Pegawai** Notifikasi (4)

Jangka Waktu Penilaian: 28 Feb 2014 s.d 31 Des 2014  
 Nama Pegawai: Ariodinoto Gondoraharjo  
 Pejabat Penilai: Andie Noegroho, S.Kom., S.AB., M.T.I.  
 Atasan Pejabat Penilai: Andri Kurniawan KP., S.Kom., M.Pd.  
 Tempat Ditetapkan: Jakarta  
 Tgl Ditetapkan: 30-06-2014

Detil Target:

No	I. Kegiatan Tugas Jabatan	Angka Kredit	TARGET				Angka Kredit	Realisasi				PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP
			Kuant/Output	Kual/Mutu	Waktu (bulan)	Biaya (Rp)		Kuant/Output	Kual/Mutu	Waktu (bulan)	Biaya (Rp)		
1	Mengolah data pegawai yang akan digunakan untuk proses kenaikan pangkat di SIMSDM	0	1 dokumen	100	10	0	0	1	90	6	0	0	0
2	Mengolah data pegawai yang akan digunakan untuk proses kenaikan gaji	0	1 dokumen	100	10	0	0	0	0	0	0	0	0

### Gambar 7

## Tampilan Hasil Form Monitoring

### MONITORING PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI

Jangka Waktu Penilaian 28 Februari s.d. 31 Desember 2014

Nama : Ariodinoto Gondoraharjo, S.T.  
 Jabatan : Pengelola Sistem Informasi pada Subbagian Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian, Bagian Perencanaan dan Informasi Kepegawaian, Biro Kepegawaian, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia  
 Unit Kerja : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia

No	I. Kegiatan Tugas Jabatan	Angka Kredit	TARGET				Angka Kredit	Realisasi				PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP
			Kuant/Output	Kual/Mutu	Waktu (bulan)	Biaya (Rp)		Kuant/Output	Kual/Mutu	Waktu (bulan)	Biaya (Rp)		
1	Mengolah data pegawai yang akan digunakan untuk proses kenaikan pangkat di SIMSDM	0	1 dokumen	100	10 bulan	0	0	1	90	6 bulan	0	250	83.33
2	Mengolah data pegawai yang akan digunakan untuk proses kenaikan gaji berkala di SIMSDM	0	1 dokumen	100	10 bulan	0	0	1	100	6 bulan	0	260	86.67
3	Mengolah data pegawai yang akan digunakan untuk proses Inpassing di SIMSDM	0	1 dokumen	100	10 bulan	0	0	1	100	6 bulan	0	260	86.67
4	Mengolah data pegawai yang akan digunakan untuk proses penskun di SIMSDM	0	1 dokumen	100	10 bulan	0	0	1	100	6 bulan	0	260	86.67
5	Mengolah data pegawai yang akan digunakan untuk membayar tunjangan kinerja di SIMSDM	0	1 dokumen	100	10 bulan	0	0	1	100	6 bulan	0	260	86.67
6	Mengolah data pegawai yang akan digunakan untuk pemberian Satalancana Karya Satya di SIMSDM	0	1 dokumen	100	10 bulan	0	0	1	100	6 bulan	0	260	86.67
7	Menyajikan Informasi kepegawaian lainnya	0	100 %	100	10 bulan	0	0	100	100	6 bulan	0	260	86.67
8	Melakukan duplikasi database SIMSDM	0	10 laporan	100	10 bulan	0	0	6	100	6 bulan	0	220	73.33
9	Memantau dan mengevaluasi penggunaan database	0	2 laporan	100	10 bulan	0	0	1	90	6 bulan	0	200	66.67
10	Melakukan uji coba fungsionalitas SIMSDM	0	2 laporan	100	10 bulan	0	0	1	100	6 bulan	0	210	70
11	Melakukan Update data kepegawaian di SIMSDM	0	2000 data	100	10 bulan	0	0	985	100	6 bulan	0	209.25	69.75
12	Menganalisis kebutuhan SIMSDM	0	1 dokumen	100	10 bulan	0	0	0	0	0 bulan	0	0	0
13	Hmbuat rancangan kebutuhan SIMSDM	0	1 dokumen	100	10 bulan	0	0	0	0	0 bulan	0	0	0
II. Tugas Tambahan dan Kreativitas													
a. Tugas Tambahan													
b. Kreativitas													
NILAI CAPAIAN SKP												67.93 (Cukup)	

Jakarta, 30 Juni 2014

Pejabat Penilai,

Andie Noegroho, S.Kom., S.AB., M.T.I.



### 3) Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja

Pada akhir tahun 2014 telah dilakukan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang meliputi penilaian SKP dan penilaian perilaku kerja.

Kegiatan terkait dengan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut

- Sosialisasi Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

#### **Gambar 8**

#### **Sosialisasi Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara**



- Pengangkatan *Person in Charge* pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk memudahkan koordinasi dalam pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIMSDM) dalam rangka penilaian kinerja.
- *Workshop* Penilaian Prestasi Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk meningkatkan pemahaman tentang penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, yang dihadiri oleh para *Person in Charge* pada masing-masing unit kerja.

**Gambar 9****Workshop Penilaian Prestasi Kerja di lingkungan  
Kementerian Sekretariat Negara****c. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja**

Pada tahun 2014 telah diselenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan mengundang narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertempat di Gedung Krida Bhakti, Kementerian Sekretariat Negara. Kegiatan tersebut dilaksanakan agar Satuan Organisasi/Unit Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dapat menyusun LAKIP sesuai sistematika yang baik.

**d. Rapat Koordinasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara**

Pada tahun 2014 telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan mengundang narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Rapat tersebut diselenggarakan dalam rangka memberikan pemahaman dan pengembangan kemampuan pejabat/pegawai terkait Sistem AKIP di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.



3. Penilaian Kinerja

a. Kementerian Sekretariat pada tahun 2014, melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Satuan Organisasi/Unit Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Adapun hasil dari evaluasi tersebut telah menghasilkan peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya, sebagaimana tergambar dengan tabel di bawah ini:

**Tabel 45**  
**Hasil Evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara**

KATEGORI PENILAIAN	SATUAN ORGANISASI / UNIT KERJA			
	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013
AA	1	5	13	13
A	3	6	1	1
B	3	3	-	-
CC	7	-	-	-
JUMLAH SATUAN ORGANISASI / UNIT KERJA	14	14	14	14

b. Kementerian Sekretariat pada tahun 2014, memberikan sertifikat bagi Satuan Organisasi/Unit Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.



## Gambar 10 Sertifikat Penghargaan



### G. Kinerja Lainnya

#### 1. Dukungan Penyelenggaraan Tiga *Event* Sidang Internasional

Berdasarkan Keppres Nomor 65 Tahun 1999 Tentang Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional, Menteri Sekretaris Negara berkedudukan sebagai Ketua Panitia Negara. Berkaitan dengan tugas tersebut, Kementerian Sekretariat Negara melaksanakan dukungan penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional (VVIP) yang hadir pada Sidang/Pertemuan Internasional setingkat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Indonesia.

Pada tahun 2014, terdapat tiga event sidang internasional yang difasilitasi yaitu pertama, The Open Government Partnership Asia Pacific Regional Conference (OGP) di Bali tanggal 4-7 Mei 2014; kedua, Global Forum United Nation Alliance of Civilization (UNAOC) di Bali tanggal 29-30 Agustus 2014; serta ketiga, Bali Democracy Forum (BDF) VII di Bali pada tanggal 10 s.d. 11 Oktober 2014. Dukungan



kesekretariatan untuk penyediaan fasilitas yang diberikan meliputi 7 kegiatan yaitu:

- a) Koordinasi penyiapan surat keputusan pembentukan panitia penerimaan VVIP (total 12 SK untuk 3 KTT, terdiri dari: 3 SK Menteri, 4 SK Seskemensetneg, 3 SK Panitia Pengadaan Barang/Jasa, 2 SK Panitia Penerima Hasil Pekerjaan);
- b) Koordinasi penyiapan fasilitas akomodasi dan ruang pendukung VVIP;
- c) Koordinasi penyiapan fasilitas rangkaian kendaraan VVIP;
- d) Koordinasi penyiapan pelayanan LO dan SO VVIP;
- e) Koordinasi penyiapan fasilitas pengamanan VVIP
- f) Koordinasi penyiapan penjemputan dan pengantaran VVIP
- g) Koordinasi penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan VVIP

Tiga *event* sidang/pertemuan internasional yang difasilitasi oleh Kementerian Sekretariat Negara adalah sebagai berikut:

- 1) *The Open Government Partnership Asia Pacific Regional Conference* (OGP) yang diselenggarakan pada tanggal 4-7 Mei tahun 2014 di kawasan Nusa Dua, Bali. OGP merupakan kemitraan internasional antara Pemerintah dengan *Civil Society Organization* (CSO) yang dibentuk pada 20 September 2011 di sela Sidang Umum PBB di New York yang diprakarsai oleh Brasil, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, Amerika Serikat dan Indonesia. OGP bertujuan untuk memajukan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasar pada prinsip-prinsip keterbukaan informasi, transparansi, partisipasi publik dan kolaborasi.

Sejak November 2013, Indonesia mendapat kepercayaan untuk menjadi Ketua Utama (*Lead Chair*) dengan Meksiko sebagai *Support Co-Chair*. OGP beranggotakan 62 negara dengan Komite Pengarah dan Pemerintah sejumlah 9 negara dan dari CSO sejumlah 9 organisasi.

- 2) *Global Forum United Nation Alliance of Civilization* (UNAOC) yang diselenggarakan pada tanggal 29-30 Agustus 2014 di Bali. Global Forum UNAOC di Indonesia kali ini didasarkan pada empat pilar



issue utama, yaitu Pemuda, Pendidikan, Media dan Migrasi. *Alliance of Civilization* (AoC) dibentuk oleh Sekjen PBB pada 14 Juli 2005 dan disponsori oleh mantan Perdana Menteri Spanyol H.E. José Luis Rodríguez Zapatero dan Perdana Menteri Turki, HE Recep Tayyip Erdoğan. Tujuan pembentukan AoC adalah untuk mendorong terciptanya “*Harmony among Civilization*”. AoC juga berupaya untuk menjembatani jurang (*gap*) antara Islam dan Barat, serta membangun keinginan dan kemauan politik bersama serta memobilisasi aksi bersama untuk menghadapi *prejudice*, mispersepsi dan menolak ekstremisme dalam masyarakat. Global Forum UNAOC ini dihadiri oleh sekitar 1.500 Peserta.

Pihak-pihak yang diundang untuk menghadiri penyelenggaraan UNAOC, yaitu:

- 5 Kepala Negara/Pemerintahan yang berasal dari mantan tuan rumah Global Forum UNAOC sebelumnya, yaitu: Spanyol, Turki, Brazil, Qatar dan Austria.
- Ketua ASEAN 2014 yakni Myanmar.
- 5 Kepala Negara/Pemerintahan perwakilan wilayah: Filipina, Fiji, Papua Nugini, Bangkok, Afrika Selatan dan India.

Pertemuan Global Forum UNAOC dihadiri oleh 3 VVIP yaitu Sekretaris Jenderal PBB, Perdana Menteri Timor Leste, dan Presiden Republik Indonesia.

- 3) *Bali Democracy Forum ke-7* (BDF VII). Tujuan penyelenggaraan BDF seperti tahun-tahun sebelumnya, yang merupakan forum pertemuan tingkat menteri yang diprakarsai oleh Kementerian Luar Negeri untuk memajukan agenda demokrasi di kawasan Asia. BDF VII dihadiri oleh beberapa Kepala Negara/Pemerintahan yaitu Sultan Brunei Darussalam, Presiden Filipina, Perdana Menteri Timor Leste, dan Presiden Republik Indonesia. Sifat BDF yang biasanya dirancang sebagai agenda pertemuan tahunan membuat Kementerian Sekretariat Negara selalu mempersiapkan anggaran guna mendukung acara dimaksud.



## 2. Kinerja dari Penilaian *Stakeholder*

- a. Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2013 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP tersebut juga telah diperoleh atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2010, 2011, dan 2012.

**Gambar 11**  
**Penghargaan opini WTP dari BPK**



- b. Dalam 4 tahun terakhir, nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara mengalami peningkatan. Hal ini memperlihatkan bahwa penerapan SAKIP di Kementerian Sekretariat Negara semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Tabel 46**  
**Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja**  
**Kementerian Sekretariat Negara 5 Tahun Terakhir**

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	SAKIP 2009	SAKIP 2010	SAKIP 2011	SAKIP 2012	SAKIP 2013
1	Perencanaan Kinerja	35	18,75	23,05	26,38	27,81	26,41
2	Pengukuran Kinerja	20	11,92	12,70	13,47	13,45	14,03
3	Pelaporan Kinerja (LAKIP)	15	9,50	9,63	11,75	11,66	12,00



No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	SAKIP 2009	SAKIP 2010	SAKIP 2011	SAKIP 2012	SAKIP 2013
4	Evaluasi Kinerja	10	6,17	6,58	7,19	6,93	7,06
5	Capaian Kinerja	20	9,83	13,18	13,40	13,75	14,48
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>56,17</b>	<b>65,14</b>	<b>72,19</b>	<b>73,60</b>	<b>73,98</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>CC</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

c. Mendapat sertifikat penghargaan sebagai peringkat ke IV Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat

**Gambar 12**  
**Sertifikat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik**





- d. Istana Kepresidenan Yogyakarta mendapat penghargaan sebagai Satuan Kerja Berkinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2014

**Gambar 13**

**Penghargaan Satuan Kerja Berkinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2014**



- e. Mendapat Sertifikat Penghargaan sebagai Juara Ketiga atas kinerja yang sangat baik di bidang pengelolaan Barang Milik Negara

**Gambar 14**

**Sertifikat Juara Ketiga atas kinerja yang sangat baik di bidang pengelolaan Barang Milik Negara**





- f. Mendapat Piagam Penghargaan dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia

Gambar 15

Piagam Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia



H. UPAYA PERBAIKAN

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Menpan dan RB atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2014, sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2888/M.PANRB/08/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan upaya-upaya perbaikan. Berikut ini adalah rekomendasi tersebut beserta upaya perbaikan.



**Tabel 47**  
**Upaya Perbaikan**

No.	Rekomendasi	Upaya Perbaikan
1	Menyajikan tujuan/sasaran strategis yang berorientasi kepada hasil/outcome dan dilengkapi dengan indikator kinerja <i>outcome</i> yang terukur pada Rencana Strategis di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembentukan Tim Evaluasi Renstra Kemsetneg 2010-2014, dengan <i>output</i> rekomendasi riviur Rencana Strategis sebagai bahan masukan Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara tahun 2015-2019, melalui Keputusan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara nomor 172 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusun Evaluasi Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2010-2014</li><li>• Kegiatan pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berorientasi <i>outcome</i>, yang dilakukan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara, tanggal 26 dan 27 November 2014</li></ul>
2	Menindaklanjuti Penetapan Kinerja secara optimal dengan rencana aksi atas rencana kerja yang dapat membantu manajemen untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala adalah dengan menyusun Rencana Aksi Kementerian Sekretariat Negara tahun 2014	<i>Monitoring</i> pelaksanaan Rencana Aksi setiap enam bulan sekali
3	Implementasi pengukuran kinerja agar sepenuhnya dilakukan secara berjenjang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan pengukuran indikator kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Workshop</i> terkait penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan sarana teknologi informasi yaitu Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia pada tahun 2014</li><li>• Kegiatan evaluasi dan monitoring Sasaran Kerja Pegawai (SKP)</li></ul>
4	Pemanfaatan LAKIP secara optimal dalam meningkatkan kinerja dan menganalisis atas capaian kinerja	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengangkatan <i>Person in Charge</i> pada masing-masing unit kerja untuk mengelola kinerja pegawai</li></ul>



No.	Rekomendasi	Upaya Perbaikan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengangkatan Manajer Kinerja pada masing-masing satuan organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Manajer Kinerja Di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara</li> </ul>
	Meningkatkan rencana aksi dalam memberikan alternatif perbaikan kinerja dan hasil evaluasi program dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja	Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2014
	meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Kemensetneg untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel	Merencanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) di bidang akuntabilitas kinerja

**Gambar 16**

**Rencana Diklat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**

11	Diklat Pranata Komputer - IT Project Management	5 – 12 Mei
12	Diklat Analis Kepegawaian - Teknis Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	16 – 22 Mei
13	Diklat Kepustakaan - Pengenalan Perpustakaan	19 – 25 Mei
14	Diklat Pranata Komputer - IT Service Management dengan ITIL V3	2 – 9 Juni
15	Diklat Kepustakaan - Pengelolaan Informasi	9 – 22 Juni
16	Diklat Analis Kepegawaian - Teknis Orientasi Persiapan Pensiun	22 – 25 Juni
17	Diklat Auditor - Penjurusan Auditor Madya	23 Juni – 8 Juli
18	Diklat Auditor - Penjurusan Auditor Muda	23 Juni – 10 Juli
19	Diklat Kewidyaiswaraan	13 Juli – 7 Agustus
20	Diklat Calon Widyaiswara	10 Agustus – 18 September
21	Diklat Auditor - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	19 – 23 Oktober
22	Sertifikasi Penjurusan Auditor Madya	10 – 13 Nopember
23	Sertifikasi Penjurusan Auditor Muda	10 – 13 Nopember
24	Diklat Kearsipan - Penyusunan Instrumen Pengelolaan Arsip	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SDM</b>		
1	Rintisan Pendidikan Gelar S2	Februari – Mei